

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah dan Perkembangannya

Sebelum membahas latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan perkembangannya, ada baiknya dijelaskan pengertian Muhammadiyah. Hal ini ada kaitannya ketika mengkaji persyarikatan ini lebih lanjut.

Secara Etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa arab, dari kata “محمد” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad itu sendiri berarti: yang terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan *ya' nisbah*¹ yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok Pengikut Nabi Muhammad SAW. (*yah* dalam hal tersebut adalah merupakan bentuk jamak).

¹Louis Ma'luf . *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Da' al Mashriq, 1986,: م . ketika menjelaskan tentang nisbah ini Louis Ma'luf tidak menjelaskan adanya *ya' nisbah* dalam bentuk “*Yah*” (ية), lebih lanjut Louis ma'luf menulis :

النسبة هي الحاق آخر الإسم ياء مشددة للدلالة على نسبة شئ إليه, وحكمها ان يكسّر ما قبل الياء للمناسبة

Ketentuan tersebut berlaku untuk beberapa jenis munasabah/nisbah :

الإسم المختوم بألف مقصورة
الأسم المختوم بألف التأنيث الممدودة
الإسم المنقوص

النسبة إلى وزن فعيل

النسبة إلى وزن فعيلة

النسبة إلى الإسم المختوم بواو

النسبة إلى الإسم المختوم بياء مشددة

Meskipun demikian, semua referensi resmi dari Muhammadiyah menyatakan bahwa *yah* tersebut adalah nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. sedangkan . Najih Achyad dalam bukunya *Ta'tjirat Kitab al-Tawhid Shekh Muhammad Ibn Abd al Wahhab fi al-Hjrah al-Islamiyah al-Islahiyh fi Indonesia*, menegaskan bahwa *yah* pada kata Muhammadiyah tersebut bukan nisbah kepada Nabi Muhamad SAW, tetapi adalah nisbah kepada Syekh Muhammad ibn Abd al Wahab.

Secara Terminologis, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:

- a. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dhul hijjah tahun 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 Nopember tahun 1912 M., di Yogyakarta.
- b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar dan *tajdid*, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur'aa dan Assunnah.²

Maksud dan tujuan Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 (enam), sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.³

Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang tertera dalam Maksud dan Tujuan Muhammadiyah di atas, oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga *ummah* terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat.⁴

²PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4.

³PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), 2.

⁴Fatah Wibisono, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks*, PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid, 3.

Mengenai profil Ahmad Dahlan, berdasar data literature yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut: Nama kecil Ahmad Dahlan adalah “Raden Ngabei Ngabdul Darwis” kemudian dikenal dengan nama Muhammad Darwisy.⁵ Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa.⁶ Adapun silsilahnya ialah: Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman bin Kyai Murtadla bin Kyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen) bin Maulana ‘Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim⁷

Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), 3. lebih lanjut Mulkhan mendapatkan data bahwa kepergian Raden Ngabei Ngabdul Darwis ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, adalah atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono VII, karena raja menganggap penting baginya untuk belajar agama dari Negara asalnya yakni Makkah. Sesudah pulang dari hajjinya, Sri Sultan memerintahkan Ahmad Dahlan bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Reformasi Islam pun mulai berlangsung dari sini.

⁶ Kutojo dan Safwan, 1991

⁷ Yunus Salam, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: TB Yogya, 1968), 6.

Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Sheh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU yakni Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912. Beliau kemudian mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Penghulu Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Disamping itu Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Munawwir Krapyak. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta ⁸

Djindar Tamimi (mantan Sekretaris PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa sebelum Muhammadiyah resmi menjadi organisasi atau persyarikatan seperti sekarang ini, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan (bentuk gerakan bersama yang dilakukan oleh beberapa orang secara spontan) yang diprakarsai oleh Dahlan yang dibantu oleh para sahabat, santri, dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, dimulai dari kampung kauman Yogyakarta pada sekitar tahun 1905 M. (sekembali dari ibadah hajinya yang kedua).⁹ Menurut keterangan

⁸Ibid., 9.

⁹Riezam, Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan* (Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 1 Muharram 1426 H), 5. (lebih lanjut dalam tulisan itu ditemukan data bahwa pada awalnya Muhammadiyah itu bukanlah organisasi, melainkan sebuah gerakan faham untuk mewujudkan

Ki Bagus Hadikusumo, gerakan tersebut oleh para santri dan sahabat Ahmad Dahlan disebut *Gerakan Ittiba' Nabi Muhammad*.¹⁰

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Subyektif.

Yang dimaksud faktor subyektif ini adalah faktor yang berkaitan pribadi Ahmad Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- a. Sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya,¹¹ hal ini dibuktikan antara lain pada saat itu Beliau pergi ke Lembang Bandung untuk mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu.
- b. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Salah satu obsesinya ialah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam, sebab hanya

keyakinan dan cita-cita hidup yang telah diyakini kebenarannya atau yang kemudian dikenal dengan istilah "Ideologi". Sedangkan organisasi atau persyarikatan yang kemudian berdiri pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1330 H./ 18 Nopember 1912 M. Merupakan upaya peningkatan peran dari gerakan, dengan maksud agar gerakan-gerakan yang dilakukan menjadi semakin efektif dan efisien. Gerakan yang mendahului organisasi inilah yang sebenarnya menjadi substansi dan esensi Muhammadiyah.

¹⁰Ibid., 36.

¹¹Mengenai pribadi Ahmad Dahlan ini, Presiden RI pertama: Soekarno sebagai orang yang pernah *nginthal* (menjadi santri) kepada Ahmad Dahlan sejak usia 15 tahun (lihat Siaran Departemen Penerangan RI, no. Stc.AI/95-62, tanggal 1 Desember 1962), dan secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah tahun 1938 menyatakan: Kita mengenal Ahmad Dahlan, tidak sekadar sebagai seorang pendiri dan Bapak Muhammadiyah saja, akan tetapi beliau adalah seorang perintis Keerdekaan dan Reformers Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan adalah manusia amal, manusia yang *sepi ing pamrih*, tapi *rame ing gawe*, manusia yang berjiwa besar, yang dadanya penuh dengan cita-cita luhur, penuh dengan semangat berjuang dan berkorban untuk kemuliaan Agama. Selanjutnya lihat dalam Solichin Salam: *Kyai Achmad Dachlan, Tjita-tjita dan Perjoangannya*, Jakarta, 1962. bandingkan juga dalam buku Soekarno dan Muhammadiyah (Jakarta: al-Wasat, 2009).

dengan pendidikan yang memadai umat Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. (kebodohan dan keterbelakangan, hanya bisa diatasi dengan satu kata: pendidikan).

- c. Sebagai ulama bertipe ulama praktis, bukan ulama teoritis, hal ini terbukti antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya yakni menggunakan metode tematik yakni memulai dari ayat-ayat yang paling mudah difaham dan mudah diamalkan.
- d. Beliau terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaharu Islam, khususnya dari kawasan timur tengah. Beberapa tokoh di antaranya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abd al Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal membangkitkan semangat Izzul Islam Wal Muslimin.

2. Faktor Obyektif.

Yang dimaksud dengan faktor obyektif adalah fakta-fakta riil yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa Indonesia. Faktor Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu *internal* dan *Eksternal*.

Dari segi internal, meliputi antara lain :

- a. Kondisi ummat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki. Akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka sering kali terjadi distorsi, terlebih pada kurun waktu itu Islam lebih difahami secara *Fiqhi* semata.

Clifford Geertz, menemukan adanya varian tingkat keberagaman umat Islam di Indonesia dalam tiga kategori yakni priyayi, abangan, dan santri.¹²

- b. Keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia adalah akibat penjajahan, dan penjajahan ini juga mengakibatkan umat Islam dan bangsa Indonesia menjadi bodoh dan miskin.
- c. Lembaga Pendidikan khususnya umat Islam di Indonesia di samping secara akademis tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan yang modern, juga tidak berorientasi ke depan yang bersifat *Problem solver* terhadap berbagai tantangan yang sedang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia pada saat itu.

Dari segi eksternal, meliputi antara lain:

- a. Kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan sangat logis bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh, dan miskin, serta kehilangan dinamika.
- b. Penjajah Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga menyiarkan ideologi agama yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para

¹²Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University Of Chicago Press, 1960), 5. Peneliti dari Amerika yang meneliti di sebuah desa (Mojokuto) Kediri, Jawa Timur ini menemukan tiga varian sikap keberagaman umat Islam di Jawa (Indonesia), bahwa kelompok *Abangn* adalah kelompok mayoritas yang kehidupannya sangat tergantung pada *ekonomi*. Kelompok Priyayi adalah kelompok pegawai pemerintahan yang hidupnya sudah terjamin karena mendapat gaji dari pemerintah colonial Belanda. Kelomok *Santri* yakni kelompok yang hidupnya ada di sekitar Kyai atau ulama. Menurut Geertz, yang paling dikhawatirkan adalah apabila kelompok abangan membantu kelompok santri menentang Belanda, maka yang akan terjadi Belanda akan menjadi repot. Itulah sebabnya Geertz memberi saran kepada Belanda untuk mengupayakan agar kelompok abangan tidak membantu (sejalan) dengan kelompok santri, dengan cara membuat suatu persaingan tidak sehat antara kelompok santri dengan kelompok priyayi. Dalam pandangan Geertz kelompok priyayi pasti akan menjadi pemenang karena ada dukungan dari Belanda, juga akan memperoleh dukungan dari kelompok abangan karena kelompok priyayi dapat memberi janji-janji ekonomi kepada kelompok abangan yang memang mereka butuhkan.

penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial tetapi juga mempunyai misi kristenisasi.

- c. Secara global pada saat itu sedang terjadi trend kebangkitan umat Islam yang didengungkan oleh para tokoh islam diberbagai negara Islam di dunia, serta sedang memuncaknya semangat ummat Islam khususnya di Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.¹³

Teologi reformasi Ahmad Dahlan berpijak pada *etika welas asih* dalam hal kepeduliannya pada nasib bangsa dan umat Islam penduduk pribumi yang sengsara dan tertindas. Itulah fenomena yang kemudian menarik elit priyayi jawa Sutomo, hingga bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah bidang kesehatan. Bahkan kemudian, bersama-sama para dokter Belanda, Sutomo mengelola Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya tanpa gaji. Semangat kemanusiaan berbasis cinta kasih telah mempersatukan orang-orang berbeda bangsa dan agama itu.¹⁴

Perlu ditegaskan pula disini, bahwa sebelum Muhammadiyah tersebar merata di seluruh Indonesia, sesungguhnya Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai upaya legalisasi terhadap organisasi yang baru didirikannya itu.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum.

¹³Yusron Asyrofi, *Kyai Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: 27-40)

¹⁴Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih*, 2. Mulkhan mengomentari gerakan yang dilakukan Dahlan, bahwa Gagasan dasar Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Qur'an, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akalsuci, dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam. Realisasi tujuan tersebut dilakukan dengan mendirikan sekolah modern, rumah sakit, kependuan, panti asuhan, dan pemberdayaan kaum tertindas dalam sistem manajemen dan organisasi modern. Berbagai ritus Islam difungsikan sebagai dasar teologi realisasi tujuan tersebut. Dari kehidupan kaum nasrani dan temuan iptek, kiyai belajar tentang pengembangan kehidupan sosial. Dari tokoh-tokoh pembaharu, ia peroleh ide rasionalisasi ajaran Islam. Sementara dari fakta-fakta sosiologis dan sejarah manusia, diperolehnya inspirasi kerja pragmatis dan humanis.

Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi.

Walaupun Muhammadiyah dibatasi perkembangannya, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul-Islam di Pekalongan, di Ujung Pandang (makassar) dengan nama al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat bimbingan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.

Perkumpulan dan Jama'ah ini mendapat bimbingan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di antara perkumpulan itu ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Hayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, T̤haratul Qulub, T̤haratul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu, wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, S̤hratul Mubtadi.

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi

dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah *Algemeene Vergadering* (persidangan umum).

Salah satu komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang murni. Jadi dasar utama yang kemudian menjadi khittahnya adalah *tandiff al-Aqidah* atau pemurnian akidah. Komitmen dasar ini sekaligus menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang dilakukannya.

Ketika Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Dahlan, pemahaman keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan. Beliau bahkan

meninggalkan pesan monumentalnya (yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku oleh Abdul Munir Mulkan: Pesan-pesan dua pemimpin besar Umat Islam Indonesia Ahmad Dahlan dan Hashim Ash'ari) bahwa Islam adalah *agama amal*. Seseorang dianggap beragama jika dia berbuat atau beramal serta mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan Hadith. Di bidang ubudiyah beliau memulai dengan mengarahkan orang yang melakukan ibadah sholat ke arah ka'bah dan bukan lurus ke barat. Adapun bentuk-bentuk amal nyata yang beliau lakukan adalah santunan kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Beliau memiliki landasan amaliah yang monumental dalam hal ini yaitu *Teologi al-ma'um*. Teologi inilah yang telah mampu menggerakkan umat Islam di kawasan Yogyakarta waktu itu untuk cinta beramal, bahkan kemudian melembaga menjadi sebuah amal usaha yakni Majelis Pembina Kesengsaraan Ummat, di kemudian hari berubah menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU).

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada saat ini belum banyak berbicara tentang fiqh dan usul fiqh, juga belum berbicara tentang ilmu takhrij al-hadith. Bahkan yang sangat menonjol adalah pemikiran teologis, baik dari serapan pemikiran Ibnu Taimiyah (wafat a328 M) yang mengkritik rasionalisme filsafat dan teologi. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengarah kepada rekonstruksi teologis (kalam) yang cenderung literalistik dan neo-hambalistik ini, mencapai puncaknya pada gerakan wahabi yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab (w.1792).¹⁵ Tetapi pada sisi lain gerakan modernisme Islam pun muncul di mesir, ketika kolonialisme Eropa memasuki kawasan timur tengah, menginspirasi

¹⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Idonesia* (Bandung: Mizan, 1994), 17-18.

Jamaluddin al-Afghani (w.1897), Muhammad Abduh (w. 1905) untuk melakukan pembaruan khususnya di bidang pendidikan dan politik. Situasi teologis dan kecenderungan pemikiran seperti itulah yang ditemui Ahmad Dahlan terutama ketika menunaikan ibadah haji dan sempat membaca buku-buku karangan mereka, bahkan pernah beremu dengan Muhammad Rashid Ridhā. Bermula dari sinilah Ahmad Dahlan menemukan bentuk dan keyakinan agama yang mantap yang tidak jauh dari paradigma pemikiran Wahabi dan kaum modernis di Mesir.¹⁶

Muhammadiyah baru memulai bergeser pada persoalan *takhrij al-Hadith* dan persoalan-persoalan ubudiyah, pada tahun 1927 (zaman kepemimpinan Kyai Ibrahim), ketika seorang tamu dari India memprotes ubudiyah Muhammadiyah yang melaksanakan *Ṣḥat* Idul Fitri di dalam masjid Keraton Yogyakarta, menurut tamu itu seharusnya Muhammadiyah yang telah memposisikan diri sebagai gerakan *tajdid* melaksanakan *ṣḥat* Idul Fithri maupun Idul Adhā di tanah lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka mulai saat itulah Muhammadiyah menghimpun para ulama Muhammadiyah untuk membicarakan berbagai persoalan ubudiyah, yang kemudian diberi nama Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini baru menampakkan eksistensinya secara profesional pada zaman kepemimpinan Mas Mansur tahun 1936-1942. Meskipun demikian dalam perkembangan berikutnya terjadi variasi penekanan pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah.

Pada tahap berikutnya yakni pada zaman kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih

¹⁶ M. Djindar Tamimi, "Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah*, no. 06/1995-2000, Muharram 1417/Mei 1996.

menonjol pada persoalan Aqidah dan Akhlaq *ijtimaiyah*. Pada saat ini dirumuskannya Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah. Dalam rumusan tersebut dirumuskan secara singkat dan padat gagasan dan pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan yang akhirnya melahirkan Muhammadiyah. Arah pemikiran keagamaan pada periode ini juga banyak mengarah pada persoalan perjuangan politis. Hal ini bisa dicermati ketika terjadi perdebatan sengit di PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1945 (tugas PPKI adalah menetapkan Undang-undang dasar dan Mukaddimahnya). Perdebatan antara yang pro dan kontra penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan *shari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ki Bagus Hadikusumo termasuk yang paling getol mempertahankan tujuh kata tersebut, yang pada waktu itu sebagai Ketua umum PP Muhammadiyah.¹⁷

Kasman Singodimejo, anggota PP Muhammadiyah, berhasil memberi penjelasan kepada Ki Bagus bahwa bangsa Indonesia menghadapi Jepang dan sekutu yang memiliki senjata canggih sehingga dibutuhkan ketenangan dan kesatuan. Lebih dari itu menurut UUD dan aturan tambahan, dalam jangka waktu duabelas bulan sesudah MPR terbentuk UUD baru akan ditetapkan ulang dan akan lebih memuaskan umat Islam. Penjelasan terakhir ini didasarkan atas keterangan Soekarno bahwa UUD itu bersifat sementara, karenanya menurut Kasman kita masih punya kesempatan untuk memperjuangkannya kembali. Dengan demikian

¹⁷Kasman Singodimejo. "Peranan Umat Islam Sekitar 17 Agustus 1945", dalam *Mimbar Ulam*, September 1979, 26. Begitu juga lihat dalam, bahrussurur-Iyunk, Teologi Amal Saleh. Surabaya: Ipam, 2005, 43.

Kibagus akhirnya menyetujui, meskipun belakangan ia masih sering menanyakannya.¹⁸

Pada periode kepemimpinan AR. Sutan mansur (1953-1959), periode H.M. Yunus Anis (1959-1962), periode Ahmad Badawi (1962-1968), seterusnya sampai pada periode Azhar Bashir (1990-1995), pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah bisa disebut *fiqh sentris* atau juga ada yang menyebut shari'ah sentris meskipun juga tidak menegasikan adanya perkembangan lain dalam masalah-masalah aqidah dan akhlaq *ijtima'iyah* yang cukup signifikan.

Haedar Nashir menemukan data yang penting tentang para elit Muhammadiyah dilihat dari segi aktifitas keseharian mereka. Bahwa Muhammadiyah sejak kelahirannya tahun 1912 sampai sekitar tahun 1960an banyak dipimpin dan digerakkan oleh elit Ulama yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren dengan pekerjaan sebagai pedagang (wiraswasta) atau swasta. Ketua-ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan (pendiri dan ketua yang pertama dari tahun 1912 sampai tahun 1923), Ibrahim (tahun 1923 sampai 1934), Hisyam (tahun 1934 sampai 1937), Mas Mansyur (tahun 1937 sampai 1942), Ki Bagus Hadikusumo (tahun 1942 sampai 1953), AR. Sutan Mansyur (tahun 1953 sampai 1959), dan HM. Yunus Anis (tahun 1959 sampai 1962), adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tamatan pendidikan pesantren yang juga sebagai pedagang, guru (dosen) dan swasta.¹⁹

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), 7. juga bisa dilihat dalam Sujarwanto & MT Arifin, dkk, *Persepsi Masa Depan Muhammadiyah* (Surakarta: PP Muhammadiyah & Lembaga penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta), 190.

Pada era kepemimpinan Ahmad Badawi (tahun 1962 sampai 1968), Faqih Utsman (tahun 1968), dan AR. Fakhruddin (tahun 1968 sampai 1990, dalam beberapa periode), Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh yang berlatar belakang sebagai pegawai negeri (Departemen Agama) kendati ke tiganya dikenal pula sebagai kiai tamatan pondok pesantren. Faqih Utsman bahkan pernah menjadi Menteri Agama selama dua kali, yaitu pada zaman kabinet Halim (1949) dan pada zaman kabinet Wilopo-Prawiro (1952-1953).²⁰

Kehadiran elit utama yang juga pegawai negeri dalam Muhammadiyah tersebut tampak menonjol sejak masa kepemimpinan AR. Fakhruddin yang cukup lama (22 tahun) yang diikuti oleh kecenderungan serupa di jajaran kepemimpinan lainnya baik di tingkat pusat maupun wilayah dan daerah. Gejala sosial ini dikenal sebagai kehadiran elit birokrat dalam Muhammadiyah.²¹

Dalam konstelasi pemikiran keagamaan baru di Indonesia, sebenarnya sudah mulai muncul mulai tahun 1970an sampai 1990an, yakni dengan munculnya wacana *Teologi Pembaruan Islam*, ide-ide itu adalah *Sekularisasi* dan *Desakralisasi*, kemudian *Pemikiran Islam Alternatif*, *Membumikan Islam*, *Reaktualisasi Islam*, *Islam Tekstual Versus Islam Kontekstual*, dsb.²² Berbarengan

²⁰Mengenai profil para tokoh (ketua) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dapat dibaca dalam buku M. Yunus Anis (et.al), *Kenalilah Pemimpin Anda: Riwayat Hidup dan Perjuangan Ketua-ketua PP Muhammadiyah* A. Dahlan sampai dengan Pak AR (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, tt), juga dalam Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah* (Yogyakarta: PT Persatuan, tt).

²¹Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan PP Muhammadiyah tentang profil Pimpinan Muhammadiyah anggota tanwir di tingkat pusat dan wilayah, tahun 1997, didapatkan data bahwa 78 % anggota pimpinan Muhammadiyah adalah pegawai negeri. Sedangkan penelitian sebelumnya yakni tahun 1990 oleh lembaga yang sama menunjukkan 77,09 % anggota pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah dan daerah adalah pegawai negeri, dan hanya 7,74 % sebagai wiraswasta dan pedagang.

²²Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensiadan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 98-113.

dengan munculnya *teologi pembaruan pemikiran Islam* itu, Muhammadiyah mulai mendapat gugatan khususnya menjelang Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Muhammadiyah dinilai telah berhenti peranannya sebagai gerakan pembaruan Islam, telah menjadi gerakan tradisional, bahkan sudah tidak lagi memiliki semangat ijtihad.²³ Akibat kritikan itu maka pasca Muktamar, benar-benar terjadi lonjakan kemajuan pemikiran keagamaan di Muhammadiyah yang luar biasa. Bermunculan *otokritik* terhadap rumusan-rumusan keagamaan (rumusan Ideologis) yang selama ini dianggap telah mapan, tak terkecuali keputusan Majelis Tarjih dalam HPT mengenai *al-Masailul Khomsu*²⁴, dan lain-lain. Dan pada saat yang sama pula mulai bergulir wacana Islam Liberal, Islam Sekuler, Islam Plural, dll.

Perkembangan baru yang cukup menonjol dan bahkan dalam hal-hal tertentu menimbulkan polemik berkepanjangan dalam hal pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah. Perkembangan baru ini adalah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais (1995-2000). Dalam waktu dua tahun perjalanan kepemimpinan M. Amin Rais mampu menghegemoni pemikiran keagamaan di tubuh Muhammadiyah. Beliau mengangkat ketua Majelis Tarjih bukan tokoh yang berbasis *shari'ah* tetapi tokoh yang berbasis *ushluddin* yakni Muhammad Amin Abdullah. Hal ini termasuk kejadian yang di luar kebiasaan. Amin Abdullah pun telah merumuskan draf manhaj majlis tarjih sebagai kelengkapan manhaj yang telah ada sebelumnya, yang kemudian disahkan dalam munas tarjih di Jakarta

²³Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonom* (Bandung: Mizan, 1993), 276. Menenai kritik terhadap Muhammadiyah, lihat juga Panji Masyarakat, no. 486, 21 November 1985, dan no. 487, 1 Desember 1985, dan o. 488, 11 Desember 1985 sebagai "laporan utama".

²⁴ PP Muhammadiyah, HPT, 277.

tahun 2000. Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut adalah tentang kemungkinan menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam pemahaman teks-teks keagamaan, di samping pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani.

Pemikiran Amin Abdullah yang cukup *revolusioner* dan keberaniannya memasukkan unsur-unsur *liberalisme* dan *pluralisme* serta *multikulturalisme* dalam pemikiran-pemikiran keagamaannya ke dalam ranah pemikiran Muhammadiyah, pada satu sisi menjadikan Muhammadiyah menjadi semakin mampu memperluas wacana pemikiran keagamaannya, membawa angin segar bagi terciptanya suasana keberagaman yang relatif damai menghadapi keyakinan-keyakinan yang berbeda bahkan perbedaan agama pun bisa dijumpai dengan gaya pemikiran ini. Tetapi pada sisi lain, pemikiran keagamaan model ini justru menimbulkan masalah sendiri bagi sebagian elit Muhammadiyah, sampai-sampai ada yang mengkhawatirkan akan terjadinya pendangkalan aqidah di kalangan Muhammadiyah. Hal ini juga terus berlaku sampai berakhirnya kepemimpinan Achmad Syafii Maarif (2000-2005).

Era baru terjadi pada periode kepemimpinan M. Din Syamsuddin (2005-2010). Pada periode ini pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak lagi diwarnai berbagai kontroversi. Majelis tarjih pun dikembalikan kembali ke gaya pemikiran keagamaan yang sudah pernah berlaku di Muhammadiyah sebelumnya, (era kepemimpinan yang lalu majlis ini bernama: *Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, maka pada kepemimpinan M. Din Syamsuddin disederhanakan menjadi: *Majlis Tarjih dan Tajdid*), tentunya tetap memperkaya

wacana dan bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan global sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada sesuatu yang patut dicatat, bahwa profil Din Syamsuddin yang alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, sementara Hasyim Muzadi (PB. NU) yang juga alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, setidaknya kesamaan ini difahami juga oleh warga Muhammadiyah maupun warga Nahdliyyin (apa lagi latar belakang keluarga Din Syamsuddin adalah Keluarga Nahdliyyin), menjadikan kedua organisasi besar Islam di Indonesia ini sangat terlihat *uhkhwah* nya. Warga Muhammadiyah maupun warga Nahdlatul Ulama pada era kepemimpinan dua tokoh ini sangat harmonis hubungan mereka, dan masing-masing juga sangat kondusif dan relatif tidak terjadi pertentangan terbuka yang menonjol.

Selanjutnya, pada era kepemimpinan M. Din Syamsuddin ini (2005-2010) Muhammadiyah mengedepankan pokok-pokok pikiran yang menjadi sikap resmi Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran tersebut terutama tentang komitmen gerakan, pandangan keagamaan, kebangsaan, serta kemanusiaan, dituangkan dalam sebuah slogan *Zawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-Zaman*.

Sikap resmi ini mengandung pokok-pokok pikiran tentang 1) Komitmen Gerakan (antara lain penegasan bahwa Muhammadiyah sesuai jati dirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarkan Islam yang bercorak *rahmatan lil-'alamin*, Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya

sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan). 2) Pandangan Keagamaan (antara lain berisi penegasan Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad SAW., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia). 3) Pandangan tentang Kehidupan (antara lain berisi penegasan memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (*ta'bid al-nafs*), penghambaan terhadap materi (*ta'bid al-mawād*), penghambaan terhadap nafsu seksual *ta'bid al-shlawāt*, dan penghambaan terhadap kekuasaan *ta'bid al-siyasiyyah* yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat). 4) Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan (antara lain berisi penegasan bahwa Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan fundamental akan semakin memperparah

krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain). 5) Agenda dan Langkah ke Depan (antara lain berisi penegasan Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikiran Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.²⁵

Sesuai dengan bidang dan konsentrasi yang penulis pilih yakni Pemikiran Islam, maka penelitian ini menfokuskan diri pada pencermatan pemikiran keagamaan (ideologis) para elit Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pemaknaan pemikiran tersebut bagi warga Muhammadiyah di bawah.

Penulis mencermati bahwa pemikiran para elit Muhammadiyah yang paling besar pengaruhnya adalah pada era muktamar ke-43 tahun 1995, muktamar

²⁵ Lebih lanjut, lihat naskah aslinya dalam lampiran.

ke-44 tahun 2000, muktamar ke-45 tahun 2005, dan muktamar ke-46 tahun 2010. Relevansi periode muktamar tersebut penulis pilih berdasarkan pertimbangan bahwa masa-masa itu adalah masa semaraknya berbagai pemikiran keagamaan dalam Islam sedang memperoleh apresiasi dari ummat Islam di Indonesia.

B. Dinamika Umat Islam Menjelang dan Pasca Kelahiran Muhammadiyah

Jika dilihat dari konteks sejarah, kelahiran Muhammadiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah 1330. atau tanggal 18 Nopember 1912 M.) benar-benar terjadi pada saat yang tepat, yakni pada saat dunia Islam sedang demam untuk bangkit dari keterpurukan. Hampir seluruh negara-negara Islam di dunia sedang mengalami ketertindasan dalam penjajahan, termasuk Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Ada dua faktor utama pendorong geliat ummat Islam Indonesia, yakni keinginan untuk merdeka, dan keinginan meningkatkan kualitas ummat Islam Indonesia sebagaimana gema kebangkitan Islam di dunia yang sedang membahana.

Tidak dapat disangkal bahwa Islam merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Perjuangan umat Islam merupakan suatu proses ke arah pembentukan pola tatanan baru dalam dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kurun waktu permulaan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, pergerakan Islam memberikan peran tersendiri di negeri ini. Perjalanan sejarah umat Islam di Indonesia memperlihatkan peranan yang amat dominan dalam menyuarakan dan menegakkan kemerdekaan dalam segala aspeknya; menentang penjajahan, mengupayakan kemerdekaan politik untuk membebaskan diri dari

belunggu pen-jajahan, perjuangan bersenjata dalam perang kemerdekaan, perjuangan di alam pembangunan dalam mengisi kemerdekaan, hingga menyuarakan kemerdekaan berpikir, umat Islam tampil paling depan dengan segala konsekwensinya. Tapi, terkadang ia tampil dalam pentas politik nasional, dan terkadang pula ia terpental darinya.

1. Zaman Kolonial Belanda

Bangsa Indonesia (baca: umat Islam) sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat (Belanda yang paling lama) yang menguasai segala aspek kehidupan dan mencoba melumpuhkan kekuatan ummat dan bangsa ini. Sejak zaman *VOC*²⁶ masa awal penjajahan Belanda, berganti ke zaman *Cultuur Stelsel* (tanam paksa) terus ke periode *Etische Politiek* (politik etis), hingga zaman *Volksraad* (Dewan Rakyat) tempat berbagai diplomasi politik ber-kembang, dan berakhir pada zaman *Exorbitante Rechten* (hak luar biasa di tangan Gubernur Jenderal), kekayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia dihisap oleh penjajah Belanda. Kemerdekaan berpikir dan bertindak dirampas oleh kekuatan politik kolonial. Akibat dari lima periode penjajahan Belanda tersebut bangsa Indonesia menanggung penderitaan yang tiada tara. Umat Islam pun bangkit menentangnya. Umat Islam menjadi barisan terdepan dalam menghadapi penjajahan Belanda, karena Islam pada dasarnya anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sebut saja Sultan Hasanudin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pengeran Dipenogoro, Teuku Umar, Tjut Nyak Dien,

²⁶ *Verenigde Oost Indische Compagnie*, merupakan sarikat dagang Hindia Belanda.

dan masih banyak pemimpin-pemimpin Islam lainnya, mereka bangkit mengobarkan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Pemerintah Belanda pun memahami, jika kesadaran persatuan umat Islam yang bersumber kepada ajaran Islam tergalang, maka bahaya dan bencana besar bagi kekuatan kolonial Belanda akan mengancam. Pada akhirnya mereka pun menggunakan politik *divide et impera*; memecah belah untuk kemudian menguasai.

Kesadaran akan pentingnya persatuan umat Islam dalam menentang penjajahan kolonial Belanda dalam bentuk organisasi, baru terwujud dan berkembang pada awal abad ke-20. Masa akhir penjajahan Belanda, memberikan gambaran tentang pertumbuhan pergerakan keislaman di Indonesia. Pada masa permulaan abad 20, ketika rasa nasionalisme modern masih baru tumbuh, kata *Islam* merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia yang berhadapan bukan saja dengan pihak Belanda tapi juga dengan orang-orang Cina. Lihatlah sebab berdirinya Sharikat Islam (1912) di Solo yang berdasarkan atas hubungan spiritual agama sekaligus sebagai front untuk (1) melawan semua penghinaan dan penindasan terhadap rakyat Bumi Putera; (2) reaksi terhadap rencana krestenings politiek dari Gubernur Jenderal *Idenburg* dengan dukungan kaum *Zending*; (3) perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan dari kaum ambtenar Bumi Putera; dan (4) perlawanan terhadap permainan dan kecurangan praktik dagang orang-orang Cina. Kesemuanya itu merupakan reaksi terhadap bentuk penindasan dan kesombongan rasial dengan Islam sebagai alat pemersatu untuk melawannya.

Persoalan kemudian yang muncul ke permukaan pada permulaan abad 20 adalah tampilnya berbagai organisasi Islam yang di satu pihak memberikan pembaruan ke dalam pola pemikiran Islam dengan melakukan pemurnian aqidah dari unsur-unsur pra Islam, dan di lain pihak, melahirkan kelompok yang berpegang teguh pada paham dan anggapan lama serta madzhab yang dianutnya. Kelompok pertama yang membawa arus gerakan pembaruan mendirikan organisasi-organisasi untuk menggalang umat Islam dan mendidik mereka agar sejalan dengan tuntutan masa. Di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan (pesantren) yang memasukkan berbagai mata pelajaran non agama ke dalam kurikulumnya. Organisasi-organisasi pembaru itu antara lain Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta, al-Irshad yang berdiri di Jakarta tahun 1914, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1923, dan berbagai organisasi lain yang sejenis.

Sementara kelompok kedua, untuk mempertahankan diri dari paham pembaru dan mempertahankan praktik bermadhab dari ancaman kaum Wahabi, maka golongan tradisional Islam ini, khususnya di Jawa, memperkuat diri dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (kebangkitan para ulama) pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama (NU) kemudian menjadi tempat berhimpun bagi kalangan mereka yang bermadhab.²⁷

Perkembangan selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang semula timbul di kalangan kelompok modernis dan tradisional yang lebih merupakan perbedaan-perbedaan dalam masalah *furu'* (cabang) dan bukan dalam masalah

²⁷ lebih jauh lihat Deliar Noer, 1980: 241-254

ushul (pokok) mulai dapat menimbulkan saling pengertian. Persatuan di antara umat Islam pun semakin terasa di kala berhadapan dengan kekuatan politik yang menghambatnya.

Ketika tahun 1935 berdiri Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tempat berhimpunnya berbagai organisasi Islam yang telah banyak bermunculan pada awal abad ke-20 guna merespon perilaku politik pemerintah kolonial. Pertemuan-pertemuan antar ulama dari berbagai organisasi menjadi dialog kerjasama untuk memecahkan masalah bersama; lepas dari penjajahan. Demikian pula, hubungan antara organisasi-organisasi Islam dan kalangan nasionalis yang netral agama dan berbeda pandangan sejak pertengahan tahun 1920-an hingga permulaan tahun 1930-an, mulai membaik dengan adanya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang didirikan tahun 1939, serta Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang didirikan pada tahun 1941. Dimana MRI merupakan pertemuan antara GAPI, MIAI, dan Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri (federasi pekerja dalam jawatan pemerintahan). Salah satu contoh dari hubungan yang membaik itu dapat dilihat dari dukungan umat Islam terhadap memorandum tuntutan Indonesia berparlemen pada tahun 1939 yang disokong sepenuhnya oleh golongan nasionalis, termasuk kalangan Islam, demikian pula tentang perubahan konstitusi Indonesia yang dituntut oleh pergerakan nasional pada tahun 1941.

2. Zaman Kolonial Jepang

Masa selanjutnya, ketika Jepang menjajah bangsa Indonesia, kolonial baru tersebut berusaha menerapkan pola *nipponisasi* terhadap bangsa Indonesia yang

mayoritas beragama Islam. Bangsa Jepang memerintahkan rakyat Indonesia, termasuk para ulamanya, melakukan saikerei (memberi hormat dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit). Cara penghormatan yang hampir sama dengan *ruku'* ini membuat marah kalangan umat Islam. Selain itu, umat Islam tidak dapat menerima kepercayaan Jepang yang meyakini bahwa mereka bangsa terpilih di dunia dan bahwa kaisar mereka merupakan turunan dewa. Menurut kalangan Islam anggapan seperti itu jelas menjurus ke arah kemusyrikan.

Kesalahan yang dapat menyinggung perasaan umat Islam itu berusaha dihapus oleh pihak Jepang; mereka berusaha menarik kaum muslimin dan mengangkatnya dengan cara memberikan kebebasan bergerak dalam organisasi Islam dengan mendirikan kembali MIAI pada 5 September 1942, dan kemudian berubah menjadi Majelis Shuro Muslimin Indonesia (Mashumi) bukan Masyumi pimpinan Mohammad Natsir.

Cara lain yang ditempuh oleh pihak Jepang untuk menarik simpati kaum Muslimin, yang di kemudian hari memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia adalah diselenggarakannya latihan-latihan kemiliteran bagi para santri, ulama, dan umumnya umat Islam. Latihan kemiliteran itu lamanya satu bulan berturut-turut mulai pertengahan tahun 1943 dan diikuti oleh sekitar 60 orang ulama dari berbagai kabupaten di Jawa. Kemudian suatu latihan yang lamanya tiga bulan diadakan untuk 80 orang guru agama dalam tahun 1944. Pada latihan-latihan ini, para peserta diajari berbagai ilmu pengetahuan umum,

semangat dan kepercayaan Jepang, metode mengajar, olah raga militer, serta baris-berbaris.

Latihan-latihan itu menurut Deliar Noer (1987) memberikan hasil, di antaranya *pertama*, para ulama dan para santri memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan rekannya yang lain, di tempat ataupun di dalam perjalanan selama latihan, yang memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran. *Kedua*, mereka ditantang oleh pikiran dan pendapat yang selama ini kurang mendapat perhatian, misalnya isi semangat dan kepercayaan Jepang. Dengan cara berdiskusi antar-sesama ulama atau santri di tempat latihan, mereka dapat membandingkan antara Islam dan kepercayaan Jepang; bahwa Islam lebih mulia dari keyakinan apa pun, termasuk keyakinan yang dianut oleh Jepang.

Latihan-latihan kemiliteran yang diselenggarakan oleh Jepang bagi para santri dan ulama, nantinya akan menumbuhkan semangat juang yang tinggi dan berguna dalam menghadapi perang kemerdekaan; Revolusi Fisik 1945-1949. Pada masa Jepang inilah, umat Islam mendirikan laskar perjuangan Hizbullah pada 1944, yang dalam Revolusi Fisik, laskar ini turut ambil bagian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, sebagian besar para pemuda muslim banyak yang tergabung dalam barisan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang telah didirikan pada bulan Oktober 1943. Selain itu, perlawanan fisik juga dilakukan oleh umat Islam terhadap Jepang yang melakukan penindasan. Romusha atau kerja paksa yang diterapkan bagi rakyat Indonesia telah mengundang kemarahan, di samping paksaan ideologi *nipponisasi*.

Dari data-data tersebut dapat diambil pemahaman bahwa meskipun Bangsa Indonesia dan ummat Islam pada khususnya sebagai bangsa dan ummat yang terjajah, dan pemahaman keagamaannya juga tergolong rendah, tetapi telah muncul era kesadaran dari ummat Islam sendiri akan perlunya peningkatan kualitas ummat Islam. Peningkatan kualitas itu kongkrit riilnya adalah adanya upaya-upaya mendirikan lembaga pendidikan yang berusaha mencerdaskan kehidupan penduduk bumi putera. Di samping itu muncul pula kesadaran bahwa keterpurukan dan keterbelakangan yang dialami penduduk bumi putera ini adalah akibat adanya penjajahan. Oleh karenanya penjajahan harus diakhiri, dengan cara ummat Islam harus membakar semangat diri untuk lepas dari penjajahan, baik dengan cara-cara yang kooperatif maupun dengan cara-cara yang konfrontatif.

Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran baik dalam upaya meningkatkan kualitas ummat Islam, maupun upaya penyadaran betapa pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan pentingnya menjaga harkat dan martabat sebagai komunitas yang mandiri, adalah Ahmad Dahlan seorang ulama yang intelektual pada waktu itu berhasil menggerakkan ummat Islam dan bangsa pribumi ini untuk bersama-sama menjadi bangsa yang mandiri, terlepas dari penjajah, serta memiliki kemampuan pemahaman terhadap Islam yang benar, dengan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah.

C. *Khittah* Muhammadiyah

Dalam perkembangan berikutnya, Muhammadiyah kemudian merasa perlu menegaskan pijakan dan landasan perjuangannya yang kemudian di kenal dengan *Khittah* Muhammadiyah, lebih lanjut mengenai *Khittah* Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Khittah berasal dari kata *حطة* yang berarti rencana, design, skema, garis kebijakan, misalnya *حطة تنفيذية* yang berarti rencana pelaksanaan.²⁸

Gerakan kembali ke *Kitabullah Wa Sunnata Rasulih*, dikumandangkan oleh Ahmad Dahlan sambil menyadarkan umat bahwa perbuatan shirik merupakan penyakit terberat sedangkan obat yang sejati adalah tauhid yang benar. Dari penegasan ini jelaslah bahwa pemurnian tauhid merupakan bagian dari *Khittah* Muhammadiyah.²⁹ *Khittah* Muhammadiyah kemudian dinyatakan oleh persyarikatan ini yakni merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1978,³⁰ *Khittah* Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut:

1. Hakekat Muhammadiyah.

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan

²⁸Attabik Ali, dan A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi karya Grafindo, 2006), 844.

²⁹Selanjutnya lihat Amin Rais, *Visi dan Misi Muhammadiyah* (Yogyakarta: TB. Suara Muhammadiyah, 1997), 15.

³⁰Mahsun jayady, *Muhammadiyah Pirifikasi Aqidah Islam dan strategi Perjuangannya* (Surabaya: LP-AIK UM, 1997), 43.

kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.

2. Muhammadiyah dan Masyarakat

Sesuai dengan ~~khittah~~ ^{kehidupannya}, Muhammadiyah sebagai Persharikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar-ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah.

Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal-usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar Pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk

meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan amal-usaha tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-Cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

3. Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Dalam hubungan ini, Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

- a. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.

- b. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persharian Muhammadiyah.

4. Muhammadiyah dan Ukhwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya.

5. Dasar dan Program Muhammadiyah

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
- b. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.

c. Menempatkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Selain itu, Muhammadiyah juga merumuskan berbagai strategi perjuangan ketika menghadapi problem-problem dakwah atau ketika bersinggungan dengan politik ketata negaraan di Indonesia ini, yang kemudian dikenal dengan *Khittah Perjuangan Muhammadiyah*. Di antara khittah perjuangan Muhammadiyah itu adalah:

1. ***Khittah Palembang*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam Mukhtamar ke 33 di Palembang tahun 1956), dan dinyatakan berlaku untuk tahun 1956-1959).

Adapun isi khittah Palembang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Menjiwai pribadi para anggota terutama para pimpinan Muhammadiyah. yaitu dengan langkah-langkah:
 - 1) Memperdalam dan mempertebal tauhid.
 - 2) Menyempurnakan ibadah dengan khushu' dan tawadju'
 - 3) Mempertinggi akhlaq
 - 4) Memperluas ilmu pengetahuan
 - 5) Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab hanya mengharapkan keridlaan Allah dan kebahagiaan umat.
- b. Melaksanakan uswatun hasanah. Yaitu dengan langkah-langkah :

- 1) Muhammadiyah harus selalu di muka membimbing ke arah pendapat umum, sehingga tetap maju dan memperbaharui
 - 2) Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada dunia manusia tentang keindahan agama Islam
 - 3) Membentuk rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam
 - 4) Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dengan tetangga sehingga terwujud desa atau kampung islam
 - 5) Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerak geriknya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- c. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, yaitu dengan langkah-langkah:
- 1) Dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah
 - 2) Pembaharuan dan memudahkan tenaga pengurus, kalau perlu dengan mutasi agar tetap segar dan giat
 - 3) Menanamkan kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan organisasi yang sehat
 - 4) Administrasi diatur menurut tuntunan yang ada
 - 5) Memelihara harta benda atau kekayaan Muhammadiyah.
- d. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki dan memperlengkapi amal usaha Muhammadiyah
 - 2) Menggiatkan gerakan perpustakaan, karang mengarang, penterjemahan, penerbitan, taman bacaan, dan Kutub Khannah
 - 3) Mendirikan asrama-asrama di sekolah-sekolah, serta pendidikan jasmani dan rohani.
- e. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Menetapkan minimum pengertian dan amalan agama yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap anggota Muhammadiyah
 - 2) Memberi penghargaan kepada tiap keluarga Muhammadiyah dan anak Muhammadiyah yang berjasa, yang tua dihormati, yang muda disayangi
 - 3) Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya
 - 4) Menempatkan pencinta dan pendukung Muhammadiyah berjenjang naik; simpatisan, calon anggota, anggota, dan anggota teras
 - 5) Mengadakan kursus kemasyarakatan di daerah.
- f. Mempererat ukhuwah, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Mempererat hubungan antar sesama muslim
 - 2) Mengadakan ikatan yang nyata, umpama berjamaah, himpunan berkala, *ta'ziah*, dll.
 - 3) Mengadakan badan islah untuk penghubung jika terjadi keretakan atau menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.

g. Menuntun penghidupan anggota, yaitu dengan langkah-langkah: Membimbing usaha keluarga Muhammadiyah yang meliputi segenap persoalan-persoalan, penghidupan dan pencarian nafkah dan menyalurkannya kepada saluran yang menuju ke arah kesempurnaan.³¹

2. ***Khitjah Ponorogo*** (*Khitjah* Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam forum Tanwir kota Ponorogo Jatim, tahun 1969. Tanwir tersebut atas amanat Muktamar Muhammadiyah ke 37 di Yogyakarta tahun 1968). Adapun isi pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pola dasar Perjuangan :

- 1) Muhammadiyah berjuang untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber ajaran Islam.
- 2) Dakwah Islam amar makruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Muhammad SAW. Adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup tersebut.
- 3) Dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar seperti yang dimaksud harus dilakukan melalui dua saluran/bidang secara simultan: (1) saluran politik kenegaraan (politik praktis), (2) saluran masyarakat.
- 4) Untuk melakukan perjuangan dakwah Islam amar makruf nahi munkar seperti yang dimaksud di atas, dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi: (1) untuk saluran bidang politik

³¹Disarikan dari, Haedar Nashir, *Khitjah Muhammadiyah Tentang Politik* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2008), 19-24.

- kenegaraan (politik praktis) dengan organisasi politik (partai), (2) untuk saluran/bidang masyarakat dengan organisasi non partai.
- 5) Muhammadiyah sebagai organisasi, memilih dan menepatkan diri "Gerakan Islam dan Amar Makruf Nahi Munkar dalam Bidang Masyarakat". Sedang untuk alat perjuangan di bidang politik kenegaraan (politik praktis), Muhammadiyah membentuk suatu partai Politik di luar organisasi Muhammadiyah.
 - 6) Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan proyeknya dan wajib membinanya.
 - 7) Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis.
 - 8) Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu.
 - 9) Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasi).

b. Program Dasar Perjuangan:

Dengan dakwah amar makruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara konkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat yang

adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT.³²

3. ***Khittah Ujung Pandang*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 38 di kota Ujung Pandang/Makassar pada tahun 1971. Khittah inilah yang paling banyak dirujuk an menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik).

Isi pokok khittah Ujung Pandang/Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apa pun.
- b. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lai, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam prsyarikatan Muhammadiyah.
- c. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar makruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap partai Muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.

³² Ibid., 24-26.

d. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.³³

4. ***Khittah Surabaya*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan di kota Surabaya pada tahun 1978). Khittah ini sudah penulis cantumkan di awal pembicaraan tentang Khittah Muhammadiyah.
5. ***Khittah Denpasar*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan di Denpasar, Bali, pada tahun 2002).

Rumusan khittah Denpasar dijelaskan sebagai berikut :

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

³³ Ibid., 29-33.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta *khittah* perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan *Baldatun Thyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (*power struggle*) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan *khittah* (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

- a. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur al-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya *Baladatul Tahyibatun wa Rabbun Ghafur*.
- c. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip

perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

- d. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.
- e. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
- f. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik

sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

- g. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
- h. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
- i. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.³⁴

³⁴Mahsun, *Pemikiran Kegamaan Gerakan Islam Kontemporer* (Surabaya: LP-AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2009), 25-37.

D. Pemikiran Ideologis dalam Muhammadiyah

Charles Glock memaknai ideology sebagai sesuatu yang paling niscaya ketika terjadi perubahan social.³⁵ Sedangkan Strark memaknai ideology sebagai suatu visi, gambaran verbal tentang masyarakat yang baik, dan sarana-sarana utama untuk mencapainya.³⁶ Sejalan dengan Strark, Riberru memberi tekanan ideologi pada sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus mengubahnya.³⁷

Ali Shari'ati mengatakan bahwa ideologi seagai ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh kelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Jadi ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan disnut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan.³⁸ Selanjutna dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Karl Mannheim, membedakan ideologi dengan utopia, bahwa keduanya sama yakni keduanya merupakan sesuatu yang belum terjadi dan bukan merupakan fakta yang empiris. Ideologi merupakan proyeksi ke depan tentang gejala yang akan erjadi berdasarkan sistem tertentu, misalnya berdasarkan sitem kapitalisme maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi, sedangkan berdasar sosialisme akan terjadi pemerataan. Sementara utopia ialah

³⁵Charles Glock,, *Religion and Society, Intension* (Chicago: Rrand Mc Nally), 25.

³⁶John B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 17.

³⁷Riberru, J. dkk, *Menguk Mitos-mitos Pembangunan, Telaah Etis dan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 1986), 4.

³⁸Ali Shari'ati,, *Tugas Cendekiawan Muslim* (terjemahan) (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1982), 146.

ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain yang pada saat ini tidak sedang berlangsung.³⁹

Dalam kaitannya dengan ideologi Muhammadiyah, Haedar Nashir (ketua PP Muhammadiyah 2005-2010), menjelaskan ideologi secara umum dimaknai sebagai 1) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, 2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan, 3) paham, teori, dan tujuan yang terpadu dan merupakan satu kesatuan program sosial politik.⁴⁰

Ideologi gerakan dalam Muhammadiyah secara mencair sesungguhnya telah melekat dalam gerakan awal organisasi Islam ini, ketika Ahmad Dahlan merumuskan dan merintis gerakan dakwahnya yang menjadi titik awal berdirinya Muhammadiyah. Jika disederhanakan, kiranya *ideologi* gerakan Muhammadiyah waktu itu ialah ideologi Islam transformatif. Yakni gerakan dakwah yang dibangun diatas pandangan keagamaan yang fundamental yang berorientasi pada perubahan di kalangan umat dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ahmad Dahlan bahkan dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan transformatif di negeri ini, jauh sebelum konsep gerakan Islam transformatif menjadi perbincangan luas dalam pemikiran Islam tahun 1980an.

Pada era Mas Mansur Muhammadiyah juga mensistematisasi gerakan melalui *langkah dua belas*. Konsep *langkah dua belas* mengandung pemikiran-pemikiran mendasar tentang Islam dan tentang Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam melalui gerakan organisasi yang teratur. Konsep ini cukup

³⁹Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Jakarta: Kanisius, 1994), 18.

⁴⁰Haedar Nashir, *Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: TB Suara Muhammadiyah, 2001), 30.

penting sebagai acuan bagi tindakan warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam mengerakkan organisasi berdasarkan misi Islam.

Tahun 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo juga dirumuskan *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah*. Konsep Muqoddimah AD Muhammadiyah termasuk hal mendasaar karena dirumuskan untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sebelum itu. Selain itu, Muqaddimah juga di rumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Dengan demikian, konsep Muqaddimah maupun *duabelas langkah* dapat dikatakan sebagai rumus ideologi Muhammadiyah dalam bentuk yang berupa prinsip-prinsip.

Konsep ideologi dalam Muhammadiyah secara lebih sistematis disusun dan tertuang dalam *Matan keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah* (MKCH). Konsep ini dirumuskan tahun 1969 sebagai amanat dari Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Muktamar ke-37 itu sendiri termasuk monumental karena menetapkan langkah baru untuk melakukan *Re-tajdid* atau mentanfidzkan kembali gerakan Muhammadiyah dari kejumudan. Maka MKCH merupakan pilar konsepsional untuk memperbaharui gerakan Muhammadiyah melalui prinsip-prinsip keyakinan dan pemikiran yang mendasar tentang Islam, tentang Muhammadiyah, dan dalam memerankan Muhammadiyah di tengah dinamika baru masyarakat Indonesia. Kondisi social politik saat itu juga berada pada awal era Orde Baru, sehingga MKCH sekaligus merupakan *antisipasi ideology* terhadap perkembangan baru bangsa dan masyarakat Indonesia.

Dari gambaran sekilas itu tampak bahwa Muhammadiyah senantiasa responsive dalam menanggapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk kemudian menjawab secara kosepsional sebagai acuan bagi tindakan gerakan. Konsep-konsep yang mendasar yang disistematisasi sebagai jawaban atas perkembangan zaman sekaligus memuat pandangan hidup Muhammadiyah itu, tiada lain sebagai konsepsi *ideologi* dalam Muhammadiyah. Namun. Karena sistem politik yang monolitik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru yang menghendaki Pancasila sebagai ideology tunggal, maka konsepsi ideology dalam muhammadiyah dirumudkan dalam format lain seperti MKCH. Tapi semangat dasarnya tetap, bahwa warga Muhammadiyah senantiasa memerlukan pandangan-pandangan dunia yang mendasar dalam melakukan gerakan dakwah, yang secara longgar disebut sebagai ideologi gerakan Muhammadiyah.

E. Muhammadiyah dan Puritanisme

Clifford Geertz antropolog dari Amerika ini ketika melakukan risetnya di Mojokutho (Kediri, Jawa timur), mencermati hubungan antara keyakinan keagamaan dengan perilaku ekonomi di kalangan muslim Mojokutho. Pikiran Geertz pun *terset up* reformisme Islam untuk melihat hubungan antara muslim reformis dan perilaku ekonomi di kalangan muslim mojokutho, yang akhirnya Geertz berkesimpulan bahwa reformisme/modernisme Islam dan pembangunan ekonomi berjalan secara beriringan. Para pemimpin komunitas bisnis di Mojokutho adalah sebagian besar muslim reformis. 7 (tujuh) dari pertokoan modern yang berdiri kokoh di Mojokutho, 6 (enam) di antaranya adalah dijalankan oleh muslim *reformis puritan*. Geertz, secara eksplisit merujuk pada

Muhammadiyah sebagai prototipe *santri reforis* yang memang terjadi hubungan antara spirit entrepreneurship dan muslim *reformis-puritan* di Indonesia.

Jika mengikuti teori Geertz ini, maka tampak karakteristik utama Muhammadiyah yang distingtif dengan varian abangan di Jawa. Sementara abangan, baik di kalangan petani maupun elit priyayi kurang individualis dan lebih hirarkhis. Muslim *reformis-modernis* Muhammadiyah cenderung individualis, pritan, egaliter, asketis, rasional, dan punya kaitan langsung dengan tradisi *entrepreneurship*.⁴¹ Akan tetapi masih perlu dilacak tentang ada tidaknya kaitan antara karakter puritan di Muhammadiyah ini dengan gerakan puritanisme secara global.

Puritanisme, dalam khazanah teologi Islam oleh para ahli sejarah diidentikkan dengan Wahhabi/wahabisme, atau diidentikkan dengan *fundamentalisme* (الأصولية).

Tetapi pemaknaan fundamentalisme dalam perspektif barat sesungguhnya berbeda dengan makna fundamentalisme dalam perspektif Islam. Jika runut pemaknaan fundamentalisme dalam perspektif Islam, berasal dari kata *الأصولية* yang berarti mempunyai akar Islam dan mengandung makna islami.⁴²

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, *fundamentalisme* memiliki rujukan dalam al-Qur'an, misalnya dalam surat al-Hashr ayat 5:

⁴¹Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1971), 2.

⁴²Muhammad Imarah, *Ma'rakah al-Mustalahat Baina al-Gharbiyyi wa al-Islam*, (terj. Mustalahah Maufur) (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 67-69.

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.⁴³

Kemudian dalam surat as-Shafat ayat 64:

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

Artinya: Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahim.⁴⁴

Dan dalam surat Ibrahim ayat 24:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفُرْعَاهَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.⁴⁵

Kata *asf* atau fondamen, pada umumnya digunakan untuk hukum agama, atau kaidah yang cocok dan bersesuaian dengan masalah-masalah yang bersifat particular. Kata *Ushl* berarti prinsip-prinsip yang diyakini dan diterima, sehingga makna keseluruhannya adalah: dalil/argument kaidah umum, yang kuat atau yang

⁴³Mujamma' Khadim al-haramain Asy Syarifain al Malik Fahd li al-thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, Medina al-Munawarah, P.O. Boks 3561, 1413 H al-Qur'an, 59 (al-Hashr): 5.

⁴⁴Ibid, al-Qur'an, 14 (al-Shafat): 64.

⁴⁵Ibid, al-Qur'an, 14 (al-Shafat): 24.

lebih dapat diterima (*rajih*). Dalam peradaban Islam, banyak bidang ilmu yang mempunyai inisial ushul, diantaranya: *Ushul al-Din*, yaitu ilmu kalam, tauhid, fiqih akbar; *Ushul al-Fiqh*, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan bahasan yang mengantarkan pada istinbat; dan *Ushul al-Hadith*, yaitu ilmu yang mencermati berbagai hal yang berkaitan dengan hadits, atau disebut Mustalah Hadith.⁴⁶

Dari pemaparan tersebut tidak ditemukan makna fundamentalisme Islam dalam arti *al-Ushliyyah* sebagaimana yang difahami oleh kalangan intelektual barat. Tetapi pada umumnya mereka mengidentifikasikan Puritanisme Islam itu dengan Wahabisme atau Wahabiyyah.

Wahhabisme atau Wahhabiyyah dinisbahkan kepada Sheikh Muhammad ibn `Abd al-Wahhab (1703-1792), pendiri gerakan puritanisme keagamaan di Semenanjung Arabia. Ia dilahirkan pada tahun 1703 di Uyainah, sebuah kota yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, di wilayah Najd, Arabia. Ia memperoleh pendidikan agama, dan pernah belajar di Madinah. Ia kemudian berkelana ke mana-mana, berkunjung dan belajar ke tempat-tempat seperti Shiria, Irak, Kurdistan, dan Persia. Ketika kembali ke Arabia, ia mulai mengajarkan bentuk Islam yang puritan, yang menyerukan kaum Muslim untuk kembali kepada dasar-dasar Islam seperti yang dikemukakan dalam al-Qur`an dan hadith, tentunya sebagaimana yang ia sendiri pahami dan tafsirkan.

Pada sekitar tahun 1777, ia tinggal di Dir`iyyah, Arabia, dan di sana ibn al-Wahhab menjadi *pemimpin spiritual* keluarga besar Sa`ud. Pada masa itu, klan

⁴⁶Lebih lanjut lihat, Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab. *Masa'il al-Jahiliyyah al-Lati>Khakafa Fiha> Rasukullah SAW. Ahl Jahiliyyah*, terj. As'ad Yasin, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 173-190.

Sa`ud adalah sebuah kelompok pembesar atau elite lokal yang sedang berusaha untuk memperluas pengaruh dan wewenang. Wahhab lalu menandatangani semacam perjanjian kerja sama dengan Muhammad ibn Sa`ud, pemimpin klan di atas. Ibn al-Wahhab dan pengikut-pengikutnya akan mendukung upaya-upaya keluarga ibn al-Sa`ud untuk memperluas pengaruh dan wewenang mereka, dan keluarga al-Sa`ud – sebagai konpensasinya – akan menyebarkan Islam yang puritan itu.⁴⁷

Tentang pertemuan keduanya di Oasis Dir`iyyah. Menurut Abu Hakimah, salah satu penulis sejarah ibn al-Wahhab:

Muhammad ibn Sa`ud menyambut Muhammad ibn al-Wahhab dan berkata, “Oasis ini milikmu, dan jangan takut kepada musuh-musuhmu. Dengan nama Allah, bahkan jika semua (orang) Najd dipanggil untuk menyingkirkan kamu, kami tidak akan pernah setuju untuk mengusirmu.” Muhammad ibn `Abd al-Wahhab menjawab, “Anda adalah pemimpin mereka yang menetap di sini dan Anda adalah seorang yang bijak. Saya ingin Anda menyatakan sumpah Anda kepada saya bahwa Anda akan melaksanakan *jihad* (perang suci) terhadap orang-orang kafir. Sebagai imbalannya, Anda akan menjadi imam, pemimpin masyarakat Muslim, dan saya akan menjadi pemimpin dalam masalah-masalah keagamaan.”⁴⁸

Dengan terbentuknya koalisi antara Ibn Sa`ud dan `Abd al-Wahhab, Wahhabiyah menjadi ideologi keagamaan bagi suatu unifikasi antarsuku di Arabia

⁴⁷Muhammad Nur Hakim, *Gerakan Revivalisme Islam dan Formalisasi Shari`ah di Indonesia*, (makalah seminar internasional “contemporary Islamic in southeast asia in the context of social, political, and cultural change”), Malang : UMM Press, 2008, 1-8.

⁴⁸ dikutip dalam al-Rasheed, 2002: 17

Tengah dan apa yang dapat disebut sebagai gerakan Wahhabiyah pun dimulai. Sebagai imam kembar gerakan Wahhabiyah, Ibn Sa`ud dan `Abd al-Wahhab menjadi pemimpin spiritual dan temporal wilayah itu. Banyak deskripsi mengenai keberhasilan ekspansi Wahhabi-Saudi yang awal menekankan fakta bahwa *raid* sejalan dengan praktik-praktik kesukuan yang dominan kala itu. Sekalipun mengandung kebenaran, hal ini menyepelekan pentingnya dimensi spiritual koalisi itu, yang menjadi daya tarik sedikitnya bagi sebagian pengikut Wahhabi yang awal. Selain keuntungan material, Wahhabisme juga menawarkan penyelamatan bukan saja di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak. Menurut sejarawan Madawi,⁴⁹ al-Wahhab membawa sesuatu yang baru, yakni pentingnya *tauhid*, ke dalam tradisi keislaman Najd yang sebelumnya didominasi *fiqh*.⁵⁰

Selain itu, peran esensial dalam pembentukan negara Wahhabi juga dimainkan oleh kelompok yang disebut Ikhwan, kekuatan militer yang dibentuk dari unsur-unsur suku, dan yang dengannya `Abd al-`Aziz berhasil menduduki Hasa. Seorang sejarawan mendefinisikan Ikhwan sebagai: “(orang-orang) Badui yang menerima ajaran-ajaran pokok ortodoksi Islam aliran Hanbali yang

⁴⁹Dikutip dari al-Rasheed (2002: 20)

⁵⁰Meskipun demikian ada reaksi yang bernada *kontra* terhadap pelopor pemurnian aqidah ini, misalnya : Seluruh karya Muhammd b. `Abd al-Wahhab sangat tipis, baik dari segi isi maupun ukurannya. Dalam rangka menjustifikasi pujiannya bagi Muhammd b. `Abd al-Wahhab, al-Faruqi menambahkan daftar “isu-isu lebih lanjut” yang ia susun sendiri pada terjemahan-Inggrisnya atas setiap bab *Kitab al-Tauhid*. Hal ini menyiratkan bahwa seolah-olah sang pengarang, yakni Muhammd b. `Abd al-Wahhab, pada mulanya telah mendiskusikan sejumlah “isu” yang muncul dari hadis-hadis di buku itu, yang sebenarnya tidak ia lakukan. Demikian pula, sebuah edisi *Kasyaf al-Shubuhah* karya Muhammd b. `Abd al-Wahhab yang diterbitkan di Riyadh pada 1388 H/1968 M memiliki catatan pada halaman judulnya, “dijelaskan secara lebih terperinci (*qama bi tafsilih*) oleh `Ali al-Hamad al-Salihi.” Sebuah buku lain yang dinisbatkan kepada Muhammd b. `Abd al-Wahhab, *Masa'il al-Jahiliyyah* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1395/1975), memuat keterangan “diperluas oleh (tawassa'a fiha) al-Sayyid Mahmud Shukri al-Alusi”.

disampaikan kepada mereka oleh `Abd al-Wahhab yang sudah dilupakan atau tidak lagi diacuhkan oleh bapak atau kakek mereka. Mereka juga adalah orang-orang Badui yang, melalui pendekatan persuasif pada missionaris agama dan karena bantuan material yang disediakan untuk mereka oleh `Abd al-`Aziz, bersedia meninggalkan cara hidup nomadik mereka untuk tinggal di Hijrah yang dibangun oleh `Abd al-`Aziz khusus untuk mereka.⁵¹

Beberapa Ajaran Pokok Wahhabisme

- a. Kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang asli, seperti yang ada dalam al-Qur`an dan hadith;
- b. Kebutuhan untuk menyatukan iman dan perbuatan;
- c. Pelarangan atas semua pandangan dan praktik yang tidak ortodoks. Hal ini menyebabkan Wahhab untuk sepanjang hidupnya memerangi praktik-praktik seperti penyembahan kepada para wali dan ziarah ke makam-makam dan tempat-tempat keramat untuk memperoleh berkah;

Muhammad ibn `Abd al-Wahhab membentuk sebuah gerakan yang pengaruhnya lebih besar dari sekadar berdirinya Arab Saudi sekarang ini. Pengaruh Wahhabi telah menyebar ke seluruh dunia Islam bahkan hanya lewat ekspose versi Islam ini kepada jutaan jamaah haji yang pergi ke Mekkah setiap tahunnya.⁵² Wahhabi mengajarkan bahwa kaum Muslim yang benar harus memiliki kepedulian terhadap politik dan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Jika para penguasa mereka gagal bertindak dan berperilaku sebagai

⁵¹Rasheed, 2002: 59).

⁵²Bandingkan dengan pernyataan Nadjih Achjad yang cenderung mengatakan bahwa Muhammad Bin Abd al Wahhab sebagai seorang pemurni akidah dan tidak berbicara soal politik. Selanjutnya lihat dalam, Achyad, Najih. *Ta'thrat Kitab al-Tauhid Shekh Muhammad Bin Abd al Wahhab fi al-Hjrah al-Islahiyyah bi Indunisiyyah*, ma'had Maskumamban Al-Islamy, 17-70.

Muslim yang baik, jika mereka gagal membangun suatu negara di mana hukum-hukum Shari`ah dilembagakan dan dijalankan, maka setiap Muslim memiliki kewajiban keagamaan untuk menggantikan penguasa itu dan pemerintahannya yang tidak Islami. Sekalipun corak khusus keislaman versi al-Wahhab yang puritan itu bukan merupakan tujuan akhir semua pembaru Muslim dewasa ini, pesan-pesannya mengenai aktivisme politik dan kaitan antara iman dan perbuatan jelas sudah tertanam dalam.

Orang-orang yang bersimpati pada ajaran-ajaran yang disebut sebagai Wahhabisme di sini tentu mungkin keberatan dengan penggunaan penamaan tersebut, karena istilah itu diberikan oleh orang-orang yang berada di luar gerakan tersebut, dan kerap kali dengan makna yang terkesan buruk. Kaum Wahhabi sendiri lebih memilih istilah nama *al-Muwahhjudun* atau *Ahl al-Tawhid* untuk menamakan kelompok mereka.⁵³ Namun, nama yang mereka gunakan sendiri itu justru mencerminkan keinginan untuk menggunakan secara eksklusif prinsip tawhid, yang merupakan landasan Islam itu sendiri. Hal ini menyiratkan pengabaian terhadap seluruh kaum Muslim yang lain, yang mereka cap telah melakukan syirik. Tidak ada alasan untuk menerima monopoli atas prinsip tawhid tersebut, dan karena gerakan yang menjadi pokok pembahasan ini merupakan karya seorang manusia, yakni Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab, maka cukup beralasan dan lazim untuk menyebut mereka *Wahhbisme dan kaum Wahhabi*.⁵⁴

Ada dua catatan lainnya. *Pertama*, dalam sejarah pemikiran Islam yang telah berlangsung lama dan sangat kaya, Wahhabisme tidak menempati tempat

⁵³ Lebih lanjut dalam, Abd al-Wahhab, Muhammad Ibnu. *Masa'il al-Jahiliyyah al-Lati>Khakafa Fika> Rasukullah SAW. Ahl Jahiliyyah*, terj. As'ad Yasin (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 22-35.

⁵⁴ Algar, 2003: 1-2

yang khususnya penting. Secara intelektual marjinal, gerakan Wahhabi memiliki nasib baik muncul di Semenanjung Arab (meski di Najad, sebuah tempat yang relatif jauh dari semenanjung itu) dan karena itu dekat dengan Haramayn, yang secara geografis merupakan jantung dunia Muslim. Keluarga Saudi, yang menjadi patron gerakan Wahhabisme, bernasib baik ketika pada abad kedupuluh mereka memperoleh kekayaan minyak yang luar biasa, yang sebagiannya telah digunakan untuk menyebarkan Wahhabisme di dunia Muslim dan lainnya. Jika tidak ada dua faktor tersebut, Wahhabisme mungkin saja hanya dicatat dalam sejarah sebagai gerakan sektarian yang marjinal dan berumur pendek. Kedua faktor yang sama pula, yang diperkuat dengan adanya sejumlah kesamaan dengan kecenderungan-kecenderungan kontemporer lainnya di dunia Islam, telah menyebabkan Wahhabisme dapat bertahan lama.⁵⁵

Kedua, Wahhabisme adalah sebuah fenomena yang sepenuhnya unik, yang perlu disebut sebagai suatu aliran pemikiran atau bahkan sekte tersendiri. Kadang kaum Wahhabi dicirikan, khususnya oleh para pengamat non-Muslim yang mencari deskripsi ringkas mengenainya, sebagai kaum Sunni yang *ekstrem* atau sebagai kaum Sunni yang *konservatif* dengan kata-kata sifat seperti *stern* atau *austere* ditambahkan di belakangnya, untuk memberi ukuran yang lebih pasti. Namun, kalangan Sunni yang jauh lebih dikenal sudah lama mengamati bahwa kaum Wahhabi, sejak pertamakali aliran mereka dikumandangkan, tidak bisa dimasukkan sebagai bagian dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamah*. Hal itu karena hampir semua praktik, tradisi dan keyakinan yang dikecam oleh Muhammad Bin

⁵⁵ Ibid., 2

`Abd al-Wahhab sudah lama diakui sebagai bagian integral dari Islam Sunni, diuraikan dalam banyak sekali literatur dan diterima oleh sebagian besar kaum Muslim. Persis karena alasan ini, maka banyak ulama yang hidup pada masa ketika Wahhabisme pertamakali dikampanyekan mengecam pendukungnya sebagai bukan bagian dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamah*. Bahwa sekarang Wahhabisme dipandang sebagai bagian dari Sunni, hal itu menunjukkan bahwa istilah Sunni mulai memperoleh makna yang luar biasa luasnya.

Ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam menurut Mudjahirin Thohir, ialah: (a) gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *the others*; (b) memiliki prinsip yang mengarah pada paham perlawanan (*oppositonalisme*); (c) penolakan terhadap hermeneutika karena pemahaman al-Qur'aan sepenuhnya adalah *skriptualistik*; (d) dan secara epistemologis, dalam wilayah gerakan sosial-politik menolak pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, umat manusia yang tengah melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks al Qur'aan, bukan sebaliknya .

Sementara konsep religio-politik di sini analog dengan sosio-politik. Jika yang akhir ini dimaknai sebagai kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan sosial, maka religio-politik bisa dimaknai sebagai kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan keagamaan. Kata politik di samping bisa mengacu pada kegiatan berpolitik, tetapi bisa juga mengarah dan diarahkan kepada strategi (baca: strategi adaptasi atau strategi merespons) yang berkembang dan yang dikembangkan oleh

suatu kelompok masyarakat dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan diri sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini mengenai ajaran agama yang dipeluknya. Dengan demikian, radikalisme religio politik, secara spesifik berarti paham-paham, sikap-sikap, dan strategi-strategi termasuk praktik-praktik (tindakan) yang berjalan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat (keagamaan) dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan ajaran agama yang diikuti dengan cara-cara radikal. Tindakan radikal dipilih bisa karena dipahaminya sebagai ajaran, pandangan, atau sikap yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan agama maupun kepentingan warga komunitas keagamaan itu sendiri, atau karena adanya tekanan-tekanan dari luar.

Dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama, radikalisme atau terkadang disebut fundamentalisme, diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran – biasanya diambil dari teks-teks suci – merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinannya itu, sehingga untuk beberapa hal membenarkan penggunaan istilah militan. Militansi di sini, umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Sikap militan itu ditunjukkan dari gerakan-gerakannya yang bersifat agresif, gemar atau siap berjuang, bertempur, berkelahi, atau berperang, terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka yang total terhadap suatu cita-cita.

Sikap radikal dan tidak-tolerant demikian itu, adalah karena “mereka menyederhanakan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat secara berlebihan. Mereka melakukan oversimplikasi terhadap persoalan yang ada” .⁵⁶

Puritanisme merupakan salah satu bentuk hegemoni agama terhadap budaya lokal. Proses hegemonisasi ini terjadi saat memandang agama sebagai entitas sakral, turun dari langit yang sama sekali baru dan berbeda dengan entitas budaya lokal yang dianggap profan. Agama dan budaya ditempatkan secara diametral dan tidak terjadi proses dialektika antara keduanya, tetapi yang terjadi adalah konflik dan penindasan yang satu terhadap yang lain. Puritanisme secara tidak langsung menggiring Muhammadiyah berwajah tunggal. Sebuah kenyataan yang sulit dipertahankan dalam konteks pluralitas budaya dan seni.

Selain itu, semangat puritanisme berimplikasi pada kuatnya komunalisme warga Muhammadiyah. Hal ini tampak begitu kental saat Sidang Tanwir 2002 dengan tidak sabar merekomendasikan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin bangsa. Mudah diduga, Amien Rais-lah kader yang dimaksud. Artinya, Muhammadiyah belum bisa melepaskan kader-kader terbaiknya meluncur *keluar* dari struktur Muhammadiyah untuk menjadi milik bangsa. Semangat puritan dan komunalisme Muhammadiyah tidak bisa memahami filosofi perguruan silat ini.

Sebagaimana Robbert N. Bellah, beyond puritanisme Muhammadiyah dimaksudkan sebagai gerakan yang melompati cagar ideologi puritan yang masih tumbuh subur di kalangan sebagian besar ulama dan warga Muhammadiyah-dan tentu saja ulama organisasi modernis lainnya-baik di tingkat pusat, wilayah,

⁵⁶ Mudjahirin Thohir, *Agama dan Radikalisme*, dalam: <http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/06/agama-dan-radikalisme/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2009.

maupun daerah. Untuk itu, gerakan pemikiran beyond puritanisme Muhammadiyah meniscayakan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, memberikan keluasan jendela pemikiran keislaman dalam konteks budaya dan seni lokal. Upaya pelonggaran pemikiran saatnya dimulai kembali agar tidak terjebak kungkungan sakralitas pemikiran⁵⁷ yang diwariskan para pendahulunya. Muhammadiyah yang hadir sebagai hal pemikiran dan aktivisme umat dan bangsa, selama ini terkesan telah berubah menjadi semacam *keraton* yang sakral, eksklusif, dan ideologis serta teralinasi dari dinamika sosial, umat, dan bangsa.

Secara metodologis hal ini dimulai dari pembongkaran visi dan paradigma lama kebudayaan Muhammadiyah yang tidak akomodatif terhadap budaya dan seni lokal. Budaya dan seni lokal tidak lagi ditempatkan secara berhadapan dengan doktrin agama secara tekstual-fiqhiyah yang cenderung bersifat menghakimi. Sebaliknya, melihat seni dan budaya lokal sebagai kenyataan yang harus diakomodasi dalam rangka lokalisasi nilai-nilai Islam.

Kedua, menggali kecerdasan lokal dan menggalang gerakan desentralisasi atau lokalisasi agama. Temuan Abdul Munir Mulkhan (2000) di Jember, Jawa Timur, cukup mengejutkan warga Muhammadiyah. Tesis Mulkhan menunjukkan, Islam murni-yakni Muhammadiyah-dalam konteks budaya lokal tidak menampakkan wajah tunggal, tetapi tampil dengan varian beragam. Beragamnya varian pengikut Muhammadiyah merupakan visualisasi dari kecerdasan lokal melalui proses dialektik antara Islam dan pluralitas budaya.

⁵⁷M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 35-36. Lebih lanjut Amin Abdullah menyebut fihak yang melakukan *Truth Claim* terhadap hasil pemikirannya sendiri, oleh Amin disebut: al-Taqdis al-Afkar al-Diniy.

Varian al-Ikhlās, Ahmad Dahlan, Muna Muhammadiyah-NU, dan Marmud/Marhaenisme Muhammadiyah) itu juga menunjukkan, artikulasi keagamaan ternyata tampil dengan membawa warna lokal. Di sinilah perlunya desentralisasi agama baik secara kelembagaan maupun produk fatwa sosial yang dihasilkan. Desentralisasi agama dalam konteks budaya lokal membuka ruang lebar bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi dari bawah dalam merespons dan menyelesaikan persoalan yang muncul di kawasan lokal dengan kekentalan budaya masing-masing.

Secara antropologis, gerakan keagamaan pada akhirnya adalah gerakan kebudayaan karena manifestasi akhir dari perilaku seseorang tampil dalam ranah budaya. Jika agama tidak mampu mengaktualisasi diri dalam wadah budaya sebagai gerakan emansipatoris, maka agama akan ditinggalkan orang. Karena itu, ulama Muhammadiyah dan umat Islam umumnya adalah bagaimana membudayakan Islam, bukan mengislamkan budaya, sehingga Islam lalu menjadi pohon peradaban yang akarnya di Bumi. Ini berarti Islam perlu membuka diri secara pro-eksistensif dan akomodatif terhadap dinamika lokal.

Ketiga, membangun jaringan kebudayaan dengan kalangan seniman dan budayawan, misalnya, dilakukan dengan cara mendirikan sanggar-sanggar budaya. Sebagai sebuah gerakan pemikiran, *beyond puritanisme* tentu saja memerlukan infrastruktur yang memadai dalam proses aktualisasinya. Infrastruktur bisa dimulai dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan membuka fakultas atau jurusan seni dan budaya.

Beyond puritanisme dengan ketiga agenda itu akan dapat mengawal proses dialektik Islam dan budaya lokal yang emansipatoris. Ini merupakan bagian dari salah satu kerja dan kekayaan Islam di masa depan, yang mencoba mengawinkan nilai-nilai Islam yang universal tanpa harus terjebak proses pemiskinan kultural, sebagaimana telah dilakukan Muhammadiyah dan sebagian golongan modernis Muslim selama ini. Hingga pemiskinan kultural dimaksud, berakibat munculnya perlawanan kultural, terutama di wilayah yang rawan konflik.⁵⁸

Maka, jika menggunakan teori Geertz dan lainnya seperti yang telah terurai di atas, bisa difahami bahwa nilai-nilai Puritanisme dalam Muhammadiyah telah ada sejak awal berdirinya sampai awal-awal perkembangannya. Sementara jika menggunakan teori Din Syamsuddin ketika mengkritisi pemikiran Rashid Ridha, Muhammadiyah lebih tepat disebut berteologi *proporsional* yaitu *Puritan Ortdoksi* dan *Salafiyah* dalam bidang ibadah mahdah. Paradigma salafiyah merupakan pilihan Ahmad Dahlan dalam memposisikan Persyarikatan Muhammadiyah.⁵⁹

F. Muhammadiyah dan Modernisme

William Shepard, mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok *Islamic-Modernisme*, yang lebih terfokus bergerak membangun *Islamic society*

⁵⁸ Mutshharun Jinan, *Beyond Puritanisme Muhammadiyah*, dalam : <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2009/11/beyond-puritanisme-muhammadiyah.html>, diakses pada 22 Desember 2009.

⁵⁹ Din Syamsuddin. *Memahami Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Pendekatan Induksi Sosiologis*. dalam, Rowi, Mukhlas, M. (ed). *Muhammadiyah Menuju Millenium III*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1999, 64-65. lebih lanjut Dien menegaskan jika dikaitkan dengan pemikiran Muhammad Abduh, maka yang terjadi di Muhammadiyah adalah cenderung "Modernis Puritan". Posisi ini lebih bagus sebagai Median Position (posisi tengah) yang mempunyai resiko dan tantangan yang besar.

(masyarakat Islam) daripada perhatian terhadap *Islamic state* (negara Islam); yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Pandangan modernis tersebut berbeda dengan pandangan sekular dan radikal Islam.⁶⁰

Para penulis atau peneliti Islam seperti James L. Peacock, Mitsuo Nakamura, Clifford Geertz, Robert van Neil, Harry J. Benda, George T. Kahin, Alfian, Deliar Noer, dan lain-lain mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang gerakannya bersifat kultural dan non-politik. Karena itu, Muhammadiyah memang sejak awal berdirinya dan telah menjadi fakta sejarah bahwa dirinya tidak bergerak dalam lapangan politik dan lebih berkonsentrasi dalam gerakan dakwah di ranah kemasyarakatan.⁶¹

Karena itu, *khittah* dan kebijakan-kebijakan Muhammadiyah menghadapi tarikan politik-praktis diletakkan dalam kerangka dan kepentingan yang besar yakni menjaga eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah non-politik dengan tetap mampu memainkan peran kebangsaan secara lebih proaktif dan konstruktif. *Khittah* dan kebijakan Muhammadiyah dalam berbagai langkah dan keputusannya yang memagari gerakan Islam ini dari tarikan-tarikan partai politik dan kepentingan politik-praktis memiliki landasan teologis, historis-sosiologis, dan organisatoris yang kuat sehingga Muhammadiyah tetap berdiri di atas garisnya yang istiqamah sebagai gerakan dakwah yang tidak berpolitik-praktis.

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Sypress, 1990), 5-33.

⁶¹ Lihat pula, Mohammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islam al-Hadith Wa Siratuhu Bi al-Isti'ma'i al-Ghabyi*, alib bahasa, Su'adi Saat (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 107-116.

Demikian pula tentang larangan rangkap jabatan di Muhammadiyah dengan jabatan-jabatan politik merupakan bagian dari implementasi khittah dan sikap Muhammadiyah yang secara tersistem memisahkan ranah gerakannya dari perjuangan politik-praktis sehingga merupakan langkah penyelamatan dan pemurnian Muhammadiyah.

Hanya satu abad sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. pada pertengahan abad ke-8 kekuasaan Islam membentang dari Spanyol sampai Xinjiang. Meskipun pusat kekhalifahan di Baghdad dihancurkan oleh Mongol pada pertengahan abad ke-13, dengan takdir Allah, laskar penakluk ini berduyun-duyun masuk Islam dan menyebarkan agama ini di Rusia, lalu keturunan mereka menegakkan kesultanan Moghul (Mongol) di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Ketika umat Islam terusir dari Spanyol pada akhir abad ke-15, muncul kesultanan Turki yang menguasai seluruh Semenanjung Balkan sampai awal abad ke-20. Bahkan ketika hegemoni politik Islam mulai redup pada abad ke-17, Islam melalui jalur perdagangan tersebar luas di Asia Tenggara dan pantai timur Afrika.⁶²

Tokoh semacam Ibn Taimiyyah ini dalam terminologi umat Islam disebut *mujaddid* (pembaharu, reformis), dan gerakan atau pemikiran yang dicanangkannya dinamakan *tajdid* (pembaharuan, reformasi). Istilah-istilah tersebut dijabarkan dari sebuah hadith yang memberitakan isyarat Nabi Muhammad SAW. bahwa akan muncul orang-orang yang memperbaharui

⁶²Muhammad Mumtaz Ali, *Modern Islamic Movements*, AS Nordeen Hayathy (Kuala Lumpur: N. Hayathy, 2000), v-vii dan 29-41.

(*yujaddidu*) agama Islam “pada setiap pangkal seratus tahun” (*`ala> kulli ra'si mi'ati sanah*) :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا
دِينَهَا (رواه أبو داود)

Artinya: Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui (urusan) agama untuk umat ni (HR. Abu Dawud).⁶³

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab I (Pendahuluan), Yusuf Qardlawi, memberi makna *tajdid* sebagai pembaruan, modernisasi, yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa Nabi. Ini bukan berarti hukum agama harus persis seperti yang terjadi pada waktu itu, melainkan melahirkan keputusan hukum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud *shar'i* dengan membersihkan dari unsur-unsur *bid'ah*, *khurafat*, atau pikiran-pikiran asing.⁶⁴ Dengan rumusan *tajdid* seperti itu nampak jelas bahwa *tajdid* dalam pengertian umum adalah pembaruan atau modernisasi. Tetapi dalam pengertian masyarakat barat kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan modern. Pikiran dan aliran itu timbul pada periode yang disebut *age of reason* (masa akal) atau *enlightenment* (masa terang) pada tahun 1500-1800.⁶⁵ Paham ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat barat dan segera memasuki lapangan agama

⁶³ Sunan Abi Dawud, Bab kitab al-Malahim, hadits no. 4291. Dalam musnad Ahmad hadits no. 5621, kualitas kesahihannya dinilai ahad. Lihat juga Muhammad Imaroh, *al-Ma'rokah al-mush-tblahat baina al-ghorbiyyi wa al-Islam* (Jakarta: Robbani Press), 238.

⁶⁴ Yusuf Qardlawi. Dasar-dasar Hukum Islam (taqlid dan ijtihad), 96.

⁶⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. UI-Press, 1978, 94.

yang di Barat dipandang sebagai penghalang bagi kemajuan. Dengan demikian modernisasi dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern. Aliran ini akhirnya membawa sekularisme di Barat.⁶⁶

Gelombang reformasi atau *tajdid* yang berdampak luas ke segenap penjuru Dunia Islam, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, mulai berlangsung pada abad ke-18, tatkala umat Islam kehilangan kreativitas dan tenggelam dalam kebekuan pemikiran, akibat tertutupnya pintu ijtihad oleh institusi-institusi keagamaan yang sudah mapan. Maka bangkitlah para tokoh pembaharu seperti Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) di Semenanjung Arabia, Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1703–1762) di India, dan Muhammad ibn Ali as-Sanusi (1791-1859) di Afrika Utara. Sebagaimana halnya Ibn Taimiyyah lima abad sebelumnya, para pembaharu pada abad ke-18 itu memusatkan gerakan mereka untuk mencairkan “kebekuan internal” yaitu memurnikan tauhid, menentang dominasi mazhab, dan memberantas hal-hal yang dianggap bid’ah. Adapun masalah “ancaman eksternal” tidaklah menjadi fokus pemikiran, sebab sebagian besar Dunia Islam belum tersentuh oleh hegemoni kelompok non-Muslim. Meskipun sejak abad ke-17 bangsa-bangsa Eropa Barat sudah berdatangan sebagai pedagang, penyebar Injil atau prajurit (*gold, gospel, glory* atau *mercenary, missionary, military*), kehadiran mereka sampai akhir abad ke-18 tidaklah menggoyahkan tatanan peradaban umat Islam.

⁶⁶ Ibid., 95.

Bangsa-bangsa Eropa Barat sebelum abad ke-16 tidaklah pernah memiliki peradaban yang dapat dibanggakan dalam sejarah. Malahan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang-orang Eropa Barat pada abad-abad pertengahan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pada universitas-universitas Muslim di Spanyol dan Sisilia. Berkat pengenalan dan pembelajaran dari peradaban Islam, Eropa Barat terstimulasi untuk bangkit dari suasana kebodohan yang mereka sebut *Dark Age* (Zaman Kegelapan), menuju masa *renaissance* (kelahiran kembali) yang bermula pada abad ke-16. Kebangkitan Eropa Barat diawali dengan proses sekularisasi atau penerapan faham sekularisme, yaitu pemisahan agama Nasrani dari pengaturan kehidupan. Dengan demikian masyarakat terbebas dari kungkungan dogma-dogma gereja dan terbukalah pengembangan ilmu pengetahuan melalui penalaran akal. Maka pada abad ke-18 yang dikenal sebagai Masa Pencerahan (*enlightenment*), Eropa Barat melahirkan peradaban modern.

Istilah *modern* baik yang berlaku di timur maupun di barat selalu mengacu pada pemaknaan secara etimologis, yakni, berasal dari kata Latin *modernus* yang artinya *baru saja; just now*, pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman (kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan dan zaman modern), tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berfikir dan bertindak. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi (cara berfikir yang rasional) dan teknikalisasi (cara bertindak yang teknikal). Tumbuhnya sains dan teknologi modern diikuti oleh berbagai inovasi di segenap bidang kehidupan.

Di bidang politik muncul paham nasionalisme, sistem partai dan parlemen, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi lahir berbagai industri, sistem pertukaran barang, serta korporasi bisnis. Di bidang sosial budaya timbul institusi dan cara hidup yang lebih efisien, mulai dari sistem administrasi dan pendidikan sampai kepada pemeliharaan kesehatan dan cara berpakaian. Semua ini ditunjang oleh proses pertukaran ide yang efektif melalui buku cetak dan media massa serta sarana komunikasi dan transportasi yang canggih sebagai buah lezat dari ilmu pengetahuan.

Dengan segala keunggulan peradaban modern, terutama di bidang persenjataan militer, bangsa-bangsa Eropa Barat melakukan ekspansi ke seluruh penjuru bumi, termasuk Dunia Islam. Setelah selama satu alaf (*millennium*) umat Islam berada di peringkat atas dalam peradaban dunia dan tidak tergoyahkan oleh peradaban manapun, tiba-tiba pada abad ke-19 arus sejarah berubah arah. Daerah-daerah Muslim, dari Maroko sampai Merauke, satu demi satu jatuh ke dalam cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Eropa. Indonesia dikuasai Belanda, India dan Malaysia dijajah Inggris, Asia Tengah jatuh ke tangan Rusia, Austria merebut Bosnia-Herzegovina, Italia mencaplok Libia dan Ethiopia, sedangkan sebagian besar Afrika dan Timur Tengah terbagi-bagi ke dalam kekuasaan Inggris dan Perancis. Pada akhir Perang Dunia I tahun 1918, daerah-daerah Muslim yang masih merdeka hanyalah Afghanistan, Iran, Turki, dan Arabia. Untunglah bangsa-bangsa Eropa tidak tertarik kepada daerah Hijaz yang gersang, sehingga terhindarlah kota-kota suci Makkah dan Madinah dari sentuhan hegemoni Eropa.

Dominasi bangsa-bangsa Eropa Barat mengakibatkan tersebarnya peradaban modern di seluruh dunia. Ketika berkenalan dengan peradaban modern, umat Islam sudah terbelenggu dengan pemahaman agama yang merupakan konsensus dan pembakuan para ulama abad pertengahan, sehingga banyak aspek modernitas yang dianggap *haram* dan ditolak mentah-mentah. Sikap ini sangat berbeda dengan sikap kreatif para ulama pada abad-abad permulaan Islam, ketika penafsiran tentang al-Qur'ān dan Sunnah Nabi belum disekat oleh rambu-rambu mazhab. Berdasarkan perintah kitab suci agar para hamba Allah gemar menginventarisasi ide-ide, lalu mengikuti yang terbaik (*yastami`unal-qaula fa yattabi`una ahlanah*), umat Islam pada masa-masa awal dengan sikap tanpa keraguan dan penuh percaya diri (sebab hegemoni politik di tangan mereka) mengambil dan menyerap nilai-nilai yang dipandang baik dari peradaban-peradaban purba di sekitar Mesopotamia dan Mediterrania, lalu menciptakan Peradaban Islam (*Islamic Civilization*) selama berabad-abad yang penuh dengan inovasi intelektual, eksperimen ilmiah, monumen yang artistik, dan karya literer yang bermutu tinggi. Sikap broad-minded yang diperintahkan al-Qur'ān itu tidak lagi dimiliki kaum Muslimin tatkala berhadapan dengan peradaban modern.

Maka pada akhir abad ke-19 bermunculan tokoh-tokoh pembaharu (*mujaddid*) yang menyeru umat Islam agar mengambil peradaban modern yang menunjang kemajuan, sebab modernisasi dalam arti yang benar, yaitu yang didasari rasionalisasi dan teknikalisisasi, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam bahkan justru diperintahkan oleh al-Qur'ān. Oleh karena para mujaddid ini

bersikap positif terhadap modernitas, mereka oleh para ahli sejarah dijuluki kelompok *modernis* dan ide mereka disebut *modernisme Islam*.

G. 1. Awal Modernisme Islam

Gerakan modernis Islam pada abad ke-19 dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1839–1897). Meskipun di Afghanistan, usianya dihabiskan di berbagai bagian Dunia Islam: India, Mesir, Iran, dan Turki. Dia mengembara ke Eropa, dari Saint Petersburg sampai Paris dan London. Di mana pun dia tinggal dan ke mana pun dia pergi, Jamaluddin senantiasa mengumandangkan ide-ide pembaharuan dan modernisasi Islam.

Bersama muridnya, Shaikh Muhammad Abduh (1849–1905) dari Mesir, Jamaluddin pergi ke Paris untuk menerbitkan majalah *al-`Urwah al-Wutsqa* (*Le Lien Indissoluble*), yang berarti “ikatan yang teguh”. Abduh menjadi pemimpin redaksi, dan Jamaluddin menjadi redaktur politik. Nomor perdana terbit 13 Maret 1884 (15 Jumad al-Ula 1301), memuat artikel-artikel dalam bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Terbit setiap Kamis, majalah itu penuh dengan artikel-artikel ilmiah dan mengobarkan semangat umat untuk kembali kepada al-Qur’ān dan Sunnah Nabi, serta menyerukan perjuangan umat Islam agar terlepas dari belenggu penjajahan Eropa. Majalah *al-`Urwah al-Wuthqa* tersebar di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, India, dan kota-kota besar di Eropa. Sayangnya, majalah ini hanya sempat beredar 28 nomor saja dan terpaksa berhenti terbit pada bulan Oktober 1884. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial Inggris melarang majalah itu masuk ke Mesir dan India, lalu pemerintah Turki Usmani (yang kuatir

akan gagasan *jumhuriyah* atau republik yang diusulkan Jamaluddin) juga melarangnya beredar di wilayah kekuasaannya, sehingga *al-Urwat al-Wutsqa*> kehilangan daerah pemasarannya. Namun dalam masa delapan bulan beredar, majalah Muslim pertama di dunia itu berhasil menanamkan benih-benih modernisme di kalangan umat Islam.

Gagasan pembaharuan Jamaluddin dan Abduh menjadi lebih tersebar luas di seluruh Dunia Islam, tatkala seorang murid Abduh yang bernama Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935) menerbitkan majalah *al-Manar* di Mesir. Nomor pertamanya terbit 17 Maret 1898 (22 Syawwal 1315), dan beredar sampai tahun 1936. Majalah *al-Manar* inilah yang secara kongkrit menjabarkan ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, serta berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-20, antara lain:

a. Singapura

Pembukaan Terusan Suez tahun 1869 menyebabkan rute pelayaran antara Eropa dan Asia Tenggara tidak lagi melalui ujung selatan Afrika melainkan beralih melalui Laut Merah. Akibatnya, kaum Muslimin di Asia Tenggara makin mudah menunaikan ibadah haji melalui pelabuhan Jeddah. Jika pada tahun 1850-an jemaah haji Indonesia rata-rata cuma 1600 orang per tahun, maka jumlah ini menjadi tiga kali lipat pada dasawarsa 1880an, lalu meningkat menjadi lebih dari 7000 jemaah per tahun pada awal abad ke-20. Selama berada di tanah suci banyak jemaah haji yang berkenalan dan

mempelajari gagasan modernisasi Islam, kemudian membawanya pulang untuk disebar di kampung halaman.

Sebagian besar jemaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci melalui Singapura, kota pelabuhan yang didirikan Thomas Stamford Raffles tahun 1819. Selain karena di Singapura jumlah kapal ke Jeddah lebih banyak dan ongkosnya lebih murah, banyak calon haji yang menetap dahulu di Singapura untuk bekerja mencukupkan biaya ke tanah suci. Memang tidak semuanya berhasil, sehingga timbul sebutan “Haji Singapura” bagi orang-orang yang gagal pergi ke Makkah. Faktor lain yang menyebabkan calon haji Indonesia pergi dari Singapura adalah karena pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat membatasi hubungan umat Islam Indonesia dengan Timur Tengah.

Tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Timur Tengah sangat berperan dalam membangkitkan perlawanan ulama-ulama Islam terhadap kolonial Belanda sepanjang abad ke-19. Perang Paderi (1821–1837) di Minangkabau timbul setelah para haji pulang dari Makkah dengan membawa ide pembaharuan Wahhabi. Pengaruh Turki sangat jelas pada Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dalam mengobarkan Perang Jawa (1825–1830). Pemberontakan rakyat Cilegon tahun 1888 dipimpin oleh para haji. Dan yang paling berat dihadapi Belanda adalah Perang Aceh (1873–1904) yang sangat diwarnai semangat keislaman melawan kaum kafir. Semua ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memperketat

persyaratan haji, sehingga para calon haji banyak memilih Singapura sebagai tempat transit.

Pada awal abad ke-20 Singapura menjadi pusat jaringan komunikasi gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara. Meskipun kaum Muslimin di kota metropolitan itu hanya seperlima jumlah penduduk (mayoritas penduduknya adalah Tionghoa), suasana urban dengan segala fasilitasnya, terutama penerbitan buku-buku dan media massa, sangat menunjang tersebarnya faham modernisme Islam yang dicanangkan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh di Timur Tengah. Apalagi kaum Muslimin di Singapura itu merupakan perpaduan berbagai etnis dari Sumatera, Semenanjung, Jawa, Bugis, Hindustan, dan Hadramaut. Dari Singapura ide-ide pembaharuan Islam tersebar baik melalui para haji yang singgah maupun melalui buku dan majalah yang diterbitkan di kota itu.

b. Minangkabau (Sumatera Barat).

Dalam perkembangan gerakan modernisme Islam di Indonesia, tidaklah dapat diabaikan peranan orang-orang Minangkabau. Di samping karena Minangkabau telah mengenal ide pembaharuan Islam sejak masa Perang Paderi, suku Minangkabau memiliki watak seperti suku Quraisy, yaitu senang mengembara (*rihlata sh-shitaa'i wa shif*), sehingga mereka terbiasa mengadakan kontak dengan dunia luar dan terbuka kepada ide-ide baru.

Menjelang akhir abad ke-19, seorang putra Minangkabau menjadi imam Masjid al-Haram di Makkah, yaitu Shaikh Ahmad Khatib al-Jawi al-

Minankabawi (1840–1916). Dia banyak mempunyai murid yang datang dari tanah air, antara lain Ahmad Dahlan (1868–1923) yang kelak mendirikan Muhammadiyah serta Hasyim Asy`ari (1871–1947) yang kelak mendirikan Nahdlatul-`Ulama`.

Meskipun memegang teguh madhhab Shafi`i, Syaikh Ahmad Khatib tidaklah melarang para muridnya mempelajari ide-ide pembaharuan dari Jamaluddin, Abduh, dan Rashid Ridha. Salah seorang murid Syaikh Ahmad Khatib adalah sepupunya, Syaikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869–1957), yang pada tahun 1893 sampai 1897 kuliah di Universitas al-Azhar di Kairo dan menjadi sahabat akrab Rashid Ridha. Ketika Rashid Ridha menerbitkan al-Manar tahun 1898, dia ikut menyumbangkan artikelnya. Syaikh Tahir pulang ke tanah air tahun 1899 dengan tekad menerbitkan majalah seperti Al-Manar di kawasan Asia Tenggara, agar gagasan modernisasi Islam lebih cepat tersiar di kalangan masyarakat.

Maka pada bulan Juli 1906 di Singapura terbitlah majalah bulanan berbahasa Melayu dengan nama Al-Imam: Majalah Pelajaran Pengetahuan Perkhawaran. Dengan Syaikh Tahir Jalaluddin sebagai pemimpin redaksi, majalah itu memuat artikel-artikel yang mengajak umat Islam untuk membuka pintu ijtihad dan mempelajari ilmu-ilmu modern, serta terjemahan artikel-artikel dari majalah al-Manar. Majalah ini terbit sebanyak 31 nomor dan berhenti tahun 1909 lantaran kehabisan dana. Gagasan modernisasi Islam yang disebarkan al-Imam ternyata lebih bergaung di Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, daripada di Malaysia.

Hal ini disebabkan pengaruh para sultan dan mufti kerajaan sangat kuat di Malaysia, sehingga ide-ide pembaharuan yang dianggap menggoyahkan kedudukan mereka sulit untuk tersebar.

Sementara itu beberapa orang murid Shaikh Ahmad Khatib di tanah suci pulang ke Minangkabau, yaitu Muhammad Jamil Jambek (1860–1947), Muhammad Taib Umar (1874–1920), Abdullah Ahmad (1878–1933), dan Abdulkarim Amrullah (1879–1945). Setelah majalah Al-Imam berhenti terbit, timbul niat di kalangan mereka berempat untuk menerbitkan majalah semacam itu di Minangkabau. Maka pada tanggal 1 April 1911 terbit majalah al-Munir di Padang, dengan Abdullah Ahmad sebagai pemimpin redaksi. Inilah majalah modernisasi Islam yang pertama di Indonesia. Sebingkai sha'ir yang ditulis Muhammad Taib Umar dalam al-Munir mencerminkan tujuan majalah ini: "Satu dua tiga dan empat, hendaklah pelajari segera cepat, membaca buku supaya sempat, ilmu pengetahuan banyak didapat. Jangan seperti orang tua kita, menuntut ilmu hanya suatu mata, fiqh saja yang lebih dicinta, kepada yang lain matanya buta".

Selama lima tahun usianya majalah al-Munir beredar di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Artikel-artikel majalah ini mengkritik praktek-praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta menganjurkan umat Islam menata metode dan sarana pendidikan. Tidaklah mengherankan jika daerah Minangkabau memelopori sekolah-sekolah agama yang menerapkan sistem kurikulum modern. Pada tahun 1909 Abdullah Ahmad mendirikan Sekolah Adabiyah

di Padang, lalu Abdulkarim Amrullah mendirikan Surau Jembatan Besi tahun 1914 di Padang Panjang. Setahun kemudian Padang Panjang juga memiliki Sekolah Diniyah Putri yang didirikan oleh Zainuddin Labai (1890–1924) dan adiknya, Rahmah al-Yunusiyah (1900–1969). Kemudian Surau Jembatan Besi bergabung dengan Surau Parabek, yang didirikan tahun 1908 oleh Ibrahim Musa (1882–1963), menghasilkan sekolah Sumatera Thawalib tahun 1918.

c. *Jakarta (Jamiatul Khair dan al-Irshad).*

Semangat modernisasi Islam mengalir pula ke Pulau Jawa. Masyarakat Arab di Jakarta mendirikan organisasi *Jam`iyat al-Khair* tahun 1901, akan tetapi baru memperoleh izin resmi dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini membangun sekolah-sekolah modern di beberapa kota, dan keanggotaannya terbuka bagi orang-orang Muslim pribumi. *Jam`iyat al-Khair* aktif mendatangkan guru-guru dari Timur Tengah, antara lain Syaikh Ahmad Surkati (1872–1943) dari Sudan. Ahmad Surkati yang merupakan penganut faham Muhammad Abduh ini tiba di Jakarta pada bulan Maret 1911.

Setelah aktif di *Jam`iyat al-Khair*, Ahmad Surkati menyadari bahwa organisasi ini terlalu didominasi oleh kaum sayyid yang berpikiran sempit. Maka pada tanggal 6 September 1914 (15 Syawwal 1332) Ahmad Surkati mendirikan organisasi *Jam`iyah al-Isfah wal-Irshad*. Organisasi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Irshad ini segera berkembang dan memiliki

cabang-cabang di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa.

d. Yogyakarta (Muhammadiyah).

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organisasi pembaharuan dan modernisasi Islam yang terbesar adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan (1868–1923). Semasa kecil bernama Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan menjabat khatib mesjid kesultanan Yogyakarta dengan julukan *Ketib Amin*. Sejak remaja Ahmad Dahlan sudah membaca majalah al-*Urwah al-Wutsqa* yang diselundupkan ke Jawa. Pada tahun 1890 Ahmad Dahlan menjadi murid Shaikh Ahmad di Makkah, dan tahun 1903 dia sengaja ke Makkah lagi untuk bermukim selama dua tahun. Ahmad Dahlan makin akrab dengan gagasan modernisasi Islam, bahkan sempat berkenalan dengan Muhammad Rashid Ridha. Setelah pulang ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan membina hubungan yang baik dengan para tokoh pembaharu di Minangkabau, Khatib terutama dengan Abdulkarim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Anak Haji Rasul, Abdul Malik, dan menantu Haji Rasul, Ahmad Rashid, kelak menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, masing-masing populer dengan nama Hamka dan A.R.Sutan Mansur.

Pada dasawarsa pertama abad ke-20 di Jawa berdiri tiga organisasi. Selain *Jam'iyat al-Khair* yang dipelopori masyarakat Arab, tumbuh pula dua organisasi pribumi, yaitu Budi Utomo tahun 1908, serta Sarekat Islam tahun 1911. Ahmad Dahlan menjadi anggota yang aktif dari ketiga

organisasi tersebut. Akan tetapi dia merasa perlu mendirikan suatu organisasi yang benar-benar berorientasi kepada gerakan modernisme Islam. Ahmad Dahlan menilai Budi Utomo tidak memperjuangkan Islam, sedangkan Sarekat Islam dilihatnya menjurus ke bidang politik. Dalam suatu pertemuan antara Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati, kedua tokoh ini sepakat untuk berbagi tugas dengan masing-masing mendirikan organisasi: Ahmad Surkati menghimpun masyarakat Arab dan Ahmad Dahlan menghimpun masyarakat pribumi.

Maka pada hari Senin Legi tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330), Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama *Muhammadiyah*, yang berarti “penegak ajaran Nabi Muhammad”. Organisasi ini berlambang matahari yang dihiasi dua kalimat syahadat, persis seperti hiasan gambar matahari di pintu Ka’bah! Dengan lambang matahari, diharapkan Muhammadiyah menjadi sumber energi yang senantiasa bersinar untuk menerangi umat Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Dahlan, organisasi Muhammadiyah merupakan realisasi firman Allah, *waltakun minkum ummah* (hendaklah ada dari kalanganmu suatu kelompok) yang berfungsi ganda, yaitu *yad`una ila l-khair* (mengajak kepada kebaikan) sebagai fungsi eksternal, serta *ya`muruna bi l-ma`ruf wa yanhauna `anil-munkar* (memerintahkan yang ma`ruf dan mencegah yang mungkar) sebagai fungsi internal. Itulah sebabnya Ahmad Dahlan merumuskan dua butir tujuan Muhammadiyah: (1) memajukan dan menggembarakan peladjaran dan pengadjaran agama Islam; serta

(2) memajukan dan menggembirakan hidoep sepandjang kemauan agama Islam dalam kalangan sekota-sekotanja.

Sejak kelahirannya, Muhammadiyah telah menetapkan garis perjuangan (*khittah*) untuk bergerak di bidang da'wah, sosial, dan pendidikan. Dengan semboyan sedikit bicara banyak bekerja serta siapa menanam dia mengetam, Ahmad Dahlan bertujuan memurnikan ajaran Islam dari apa yang disebutnya T.B.C. (*tahyul, bidah, hwarafat*). Muhammadiyah mempelopori penentuan arah kiblat secara eksak; penggunaan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadhan; shalat hari raya di lapangan; pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging kurban kepada fakir miskin; pemberian khutbah dalam bahasa yang difahami jemaah; pelaksanaan shalat Jum'at dan tarawih yang sesuai dengan cara Nabi; penghilangan bedug dari mesjid; penyederhanaan upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pengurusan jenazah; serta masih banyak lagi usaha-usaha Muhammadiyah yang mengembalikan umat Islam kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Di bidang sosial dan pendidikan Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan poliklinik. Agar kaum wanita terangkat derajatnya, Ahmad Dahlan dan istrinya, Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan), mendirikan perkumpulan *Sopotresno* tahun 1914, yang diubah namanya menjadi *Aisyiyah* pada tahun 1917.

Kemudian berdiri pula kepanduan *Hizbul Wat'han* tahun 1918, di samping perkumpulan *Siswapraja Wanita* dan *Siswapraja Pria* sebagai

wadah anak-anak muda, yang kemudian masing-masing menjadi Nashi'atul-Aisyiyah tahun 1931 dan Pemuda Muhammadiyah tahun 1932. Sampai tahun 1920 organisasi Muhammadiyah dimatangkan di Yogyakarta dan sekitarnya. Sesudah itu Muhammadiyah mulai menyebar dan mendirikan cabang-cabang di beberapa kota: Surakarta (1920), Surabaya dan Madiun (1921), serta Pekalongan, Garut dan Jakarta (1922). Setelah Ahmad Dahlan wafat tahun 1923, kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh sahabatnya, Kyai Haji Ibrahim, yang memimpin organisasi sampai tahun 1932. Pada periode Ibrahim ini Muhammadiyah menyebar ke luar Jawa: Sumatera (1925), Kalimantan (1927), dan Sulawesi (1929).

Demikianlah akhirnya Muhammadiyah tersebar di seluruh Nusantara, sehingga dalam Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang bulan Juni 1933 dengan bangga Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*) melaporkan bahwa “Moehammadijahlah Persjarikatan jang pertama-tama banjak tjabang dan groepnja, tersiar moelai dari Sabang sampai Merauke dan dari Teloekebetoeng sampai Manado dan Ternate”.

Muhammadiyah merupakan gerakan modernis Islam yang mempunyai dampak paling luas di Indonesia. Pada mulanya organisasi ini mendapat tantangan dan hambatan, terutama dari kaum adat dan ulama tradisional. Muncul tuduhan bahwa Muhammadiyah menyimpang dari garis *ahlus-sunnah wal-jama`ah*. Akan tetapi lambat laun masyarakat menyadari bahwa modernisasi memang suatu keharusan. Kegiatan Muhammadiyah yang dahulu dicela kini ditiru diam-diam. Sekolah-

sekolah modern yang dahulu menjadi tuduhan kepada Muhammadiyah meniru Belanda terpaksa didirikan orang juga. Kepanduan yang dahulu dianggap *tashabbuh* (menyerupai orang kafir) di mana-mana telah tumbuh. Golongan-golongan yang dahulu menghambat langkah Muhammadiyah akhirnya tidak mendapat jalan lain kecuali meniru jejak Muhammadiyah.

Sejak mulai berdiri, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. Tidak mencampuri politik, itulah politiknya! Ia semata-mata gerakan da'wah. Akan tetapi tidaklah dapat dinafikan pengaruh Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa. Sebagai satu-satunya organisasi di zaman kolonial yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, maka kongres-kongres Muhammadiyah yang berlangsung setiap tahun sangat berperan dalam membina persatuan nasional. Apalagi bahasa Melayu selalu digunakan dalam kongres-kongres tersebut, meskipun bahasa Melayu saat itu belum dikukuhkan sebagai Bahasa Indonesia. Perjuangan di bidang politik banyak diisi oleh orang-orang Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah sebagai organisasi tidak berpolitik praktis. Cukuplah di sini disebutkan bahwa ketika Republik Indonesia lahir tahun 1945 jabatan-jabatan strategis di negara ini dipegang oleh orang Muhammadiyah, yaitu Presiden Sukarno, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, Jaksa Agung Kasman Singodimedjo, serta Menteri Agama Muhammad Rasyidi. Beberapa tokoh Muhammadiyah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, yaitu Ahmad Dahlan, Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan, Fachruddin, dan Mas Mansur.

e. Bandung (Persatuan Islam).

Pembicaraan mengenai gerakan modernis Islam tidaklah lengkap apabila kita mengabaikan sebuah organisasi pembaharuan yang bersifat “cabe rawit”: kecil tetapi pedas! Itulah organisasi Persatuan Islam (Persis) yang didirikan di Bandung tanggal 17 September 1923 (5 Safar 1342) oleh ulama asal Palembang, Zamzam (1894–1952), yang juga pernah bertahun-tahun menuntut ilmu keagamaan di Makkah. Seperti Muhammadiyah dan al-Irshad, Persatuan Islam juga menyatakan sebagai penerus gerakan pembaharuan Muhammad Abduh dan Rashid Ridhā. Kelahiran organisasi ini dilandasi firman Allah “berpegang-teguhlah kepada tali Allah bersama-sama dan janganlah bercerai-berai *wa`tasjmu>bi hāblillāhi jamī`an wa la>tafarraqu>* serta sabda Nabi “tangan Allah bersama orang-orang yang mengelompok *yadullāhi ma`al-jama`ah*.”

Tokoh Persatuan Islam yang terkenal adalah Ahmad Hassan (1887–1958). Lahir dan besar di Singapura, Ahmad Hassan sejak remaja sudah mengenal gagasan pembaharuan yang disebarkan majalah al-Imam. Dia banyak menulis artikel mengenai keharusan umat Islam kembali kepada ajaran al-Qur`ān dan As-Sunnah. Pada tahun 1921 Ahmad Hassan pindah ke Surabaya, daerah asal ibunya. Di sini dia menjadi akrab dengan Ahmad Surkati. Kemudian pada tahun 1925 Ahmad Hassan pindah ke Bandung, menjadi anggota Persatuan Islam tahun 1926, dan segera menjadi tokoh yang mewarnai corak dan gaya organisasi itu, yaitu keras, konsisten, dan tidak mengenal kompromi.

Ahmad Hassan berpendapat bahwa pintu ijtihad harus dibuka dengan cara *shock therapy*, sehingga umat Islam terbangun dari tidur lelap. Jika Muhammadiyah mengutamakan aksi-aksi sosial melalui sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, maka Persatuan Islam mengutamakan da'wah lisan dan tulisan, seperti memperbanyak tabligh, menerbitkan buku dan majalah, menyelenggarakan debat publik, dan berpolemik di media massa. Buku-buku dan majalah yang diterbitkan Persatuan Islam menjadi bahan rujukan bagi kaum modernis di Indonesia, terutama majalah *Pembela Islam* dan *al-Lisan*. Demikian pula seri buku *Soe'al Djawab* karya Ahmad Hassan tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun 1940 Ahmad Hassan pindah ke Bangil sampai ia wafat tahun 1958, meskipun pusat Persatuan Islam tetap di Bandung. Ahmad Hassan banyak meninggalkan karya berupa buku-buku yang sampai kini terus dicetak ulang, misalnya *Tafsir al-Furqan*, *Pengajaran Shalat* dan terjemahan *Bulughul-Maram*. Murid-murid Ahmad Hassan tersebar di mana-mana. Salah seorang muridnya yang cemerlang adalah Mohammad Natsir (1908–1993), siswa AMS di Bandung yang menjadi aktivis Persatuan Islam, dan kelak menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia serta tokoh yang terkenal di Dunia Islam. Bahkan Bung Karno pun mengaku sebagai murid Ahmad Hassan, sebagaimana tertulis pada “Surat-surat Islam dari Ende” dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*.

G.2. Kaum Tradisionalis

Munculnya gerakan modernisme menyebabkan para pengamat keislaman membagi umat Islam Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu kaum modernis dan kaum tradisionalis. Disebut terakhir ini pada garis besarnya mempunyai tiga ajaran utama. Pertama, menganut madhhab Muhammad ibn Idris ash-Shafi`i (767-820) dalam masalah hukum agama, dengan tidak mengesampingkan mazhab Abu Hanifah (700-767), madhhab Malik ibn Anas (711-795), dan madhhab Ahmad ibn Hanbal (780-855). Kedua, menganut skolastisisme Abu>Hasan al-Ash`ari (873-935) dan Abu>Mansur al-Maturidi (896-944) dalam masalah ketuhanan. Ketiga, menganut ajaran Abul-Qasim al-Junaidi (828-910) dan Abu>Hamid al-Ghazali (1058-1111) dalam masalah tasawuf. Kaum modernis pada umumnya tidak merasa terikat pada ajaran pertama dan ketiga, sedangkan faham Ash`ariyyah diterima dalam bentuk seperlunya saja.

Kaum tradisionalis di Indonesia juga terstimulasi untuk membentuk organisasi. Pada tahun 1917 Abdul Halim di Majalengka mendirikan *Persharikatan Ulama* (sejak 1952 bernama Persatuan Umat Islam atau PUI). Lalu pada 31 Januari 1926 (17 Rajab 1344) di Surabaya lahir *Nahdhatul-`Ulama* (NU) yang didirikan Hasyim Asy`ari (1871-1947). Kemudian menyusul dua organisasi di Sumatera, yaitu *Persatuan Tarbiyah Islamiyah* (Perti) di Minangkabau pada tanggal 5 Mei 1928 (15 Dzulqa`dah 1346), serta *Jam`iyyah al-Washfiyyah* di Medan pada tanggal 30 November 1930 (9 Rajab 1349). Semua organisasi kaum tradisionalis ini mempertahankan madhhab Shafi`i.

Kemajuan sains dan teknologi mengantarkan umat manusia memasuki abad ke-21 dengan segala persoalan yang multikompleks, seperti pencemaran lingkungan, menipisnya sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, serta pembauran kultural akibat canggihnya informasi dan komunikasi. Semua ini memiliki dampak terhadap pemahaman agama oleh umat manusia, termasuk umat Islam. Tidaklah dapat dihindari kemungkinan untuk melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap pemahaman ajaran agama yang selama ini dianggap baku.

Gerakan-gerakan modernisme Islam oleh beberapa pengamat dinilai telah kehilangan semangat pembaharuannya, karena terlalu sibuk mengelola amal usaha dan kegiatan rutin lainnya, sehingga kurang tanggap terhadap masalah-masalah baru yang dihadapi umat Islam. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan tersebut, Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Irshad, dan gerakan sejenisnya yang terlanjur dijuluki kaum pembaharu lebih meningkatkan ijtihad dalam merespons tantangan abad ke-21 yang makin rumit dan tidak terduga arahnya.

Nilai-nilai Modernisme dalam Muhammadiyah, dapat dilacak lewat pemahaman pengertian modern yang mengacu bukan hanya kepada zaman (kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan dan zaman modern), tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berfikir dan bertindak. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi (cara berfikir yang rasional) dan teknikalisasi (cara bertindak yang teknikal). Hal ini bisa dirujuk lewat catatan sejarah bahwa Ahmad Dahlan sangat dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh yang oleh para ahli sejarah disebut sebagai tokoh aliran

Modern dalam Islam, yakni Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Ahmad Dahlan mempunyai referensi yang sebegini besarnya adalah buku-buku tulisan tokoh-tokoh tersebut.

G. Muhammadiyah dan Liberalisme

Dalam khasanah pemikiran politik Barat klasik, istilah *liberal* bertaut erat dengan dikotomi antara *liber* dan *servus*. Yang pertama mengacu pada warga negara yang bebas, yang kedua berarti budak yang tidak bebas karena senantiasa berada dalam dominasi tuannya. Dalam pengertian klasik, *liber*, sang warga negara bebas dalam arti tidak berada dalam dominasi siapapun. Inilah pengertian bebas dalam tradisi republik

H.1. Sanad Firqah Liberal

Islam liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18 dikala kerajaan Turki Utsmani Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal tengah berada digerbang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan permurnian, kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Shah Waliyullah (India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi dikalangan Shi'ah. Ada Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar.

Ide ini terus bergulir. Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi (Mesir, 1801-1873) memasukkan unsur-unsur Eropa dalam pendidikan Islam. Shihabuddin Marjani

(Rusia, 1818-1889) dan Ahmad Makhdun (Bukhara, 1827-1897) memasukkan mata pelajaran sekuler kedalam kurikulum pendidikan Islam.⁶⁷

Di India muncul Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-18%) yang membujuk kaum muslimin agar mengambil kebijakan bekerja sama dengan penjajah Inggris. Pada tahun 1877 ia membuka suatu kolese yang kemudian menjadi Universitas Aligarh (1920). Sementara Amir Ali (1879-1928) melalui buku *The Spirit of Islam* berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal yang dipuja di Inggris pada masa Ratu Victoria. Amir Ali memandang bahwa Nabi Muhammad adalah Pelopor Agung Rasionalisme.⁶⁸

Di Mesir muncullah Muhammad Abduh (1849-1905) yang banyak mengadopsi pemikiran Mu'tazilah berusaha menafsirkan Islam dengan cara yang bebas dari pengaruh salaf. Lalu muncul Qasim Amin (1865-1908) kaki tangan Eropa dan pelopor emansipasi wanita, penulis buku *Tahrir al-Mar'ah*. Lalu muncul Ali Abd. Raziq (1888-1966), yang mendobrak sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik karena Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah (1926-1997) yang mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh al-Qur'aan hanyalah sistem demokrasi tidak yang lain.⁶⁹

Di al-Jazair muncul Muhammad Arkoun (lahir 1928) yang menetap di Perancis, ia menggagas tafsir al-Qur'aan model baru yang didasarkan pada berbagai disiplin Barat seperti dalam lapangan semiotika (ilmu tentang fenomena

⁶⁷Charless Kurzman: xx-xxiii

⁶⁸Watt, William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London: Routledge, 1988), 132, 180-185.

⁶⁹Charless: xxi,18

tanda), antropologi, filsafat dan linguistik. Intinya Ia ingin menelaah Islam berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan Barat modern. Dan ingin mempersatukan keanekaragaman pemikiran Islam dengan keanekaragaman pemikiran diluar Islam.⁷⁰ Di Pakistan muncul Fazlur Rahman (lahir 1919) yang menetap di Amerika dan menjadi guru besar di Universitas Chicago. Ia mengagas tafsir kontekstual, satu-satunya model tafsir yang adil dan terbaik menurutnya. Ia mengatakan al-Qur'an itu mengandung dua aspek: *legal spesifik* dan *ideal moral*, yang dituju oleh al-Qur'an adalah ideal moralnya karena itu ia yang lebih pantas untuk diterapkan.⁷¹ Di Indonesia muncul Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman, intelektual muslim yang pernah bermukim di Chicago) yang memelopori gerakan firqah liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wachid.⁷²

Nurcholis Madjid telah memulai gagasan pembaruannya sejak tahun 1970an. Pada saat itu ia telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: "Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh diatas dasar paham kenisbian (relativisme) bentuk-bentuk formal agama ini dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama".⁷³

Selain itu, pengertian liberal dalam artinya yang modern juga tidak lepas dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Liberalisme yang lahir di Eropa abad 17

⁷⁰Mohammed Arkoun, *Aaql al-Arabiyy*, Pemikiran Arab, terj. Yudian W. Asmin. (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 1996), 14. lihat juga, Jurnal Salam vol.3 No. 1/2000 hal 100-111; Abd. Rahman al-Zunaidi: 180; William M Watt: 143).

⁷¹Fazhul Rahman: 21; William M. Watt: 142-143).

⁷²Adiyan Husaini dalam makalah *Islam Liberal dan misinya menukil* dari Greg Barton, Sabili no. 15: 88).

⁷³Nur Cholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 198), 239

bertaut erat dengan perlawanan terhadap ketidakadilan kekuasaan monarki. Liberalisme lahir sebagai upaya untuk melindungi hak-hak sipil warga negara dari kekuasaan absolut sang raja. Ada semacam penegasan bahwa hak-hak sipil, terutama hak milik pribadi, tidak bisa begitu saja diklaim oleh sang raja, atau menjadi milik sewenang-wenang dari kaum aristokrat. Makanya tidak heran kalau semangat liberalisme adalah pembatasan kekuasaan tiranik dan absolut yang datang dari manapun agar setiap warga punya kebebasan untuk menikmati hak-hak sipilnya dan mengembangkan dirinya sendiri. Kekuasaan mesti dikontrol dan diawasi agar tidak mencaplok kebebasan individu.

Meskipun liberalisme lahir dan berkembang di Barat, tapi esensinya, yakni “penolakan terhadap kekuasaan tiranik demi melindungi hak-hak warga negara” merupakan kebajikan yang relevan dengan masyarakat non Barat, termasuk dalam ajaran agama Islam.

Rifa'ah Tahtawi pembaharu muslim dari Mesir abad ke-18 yang menjadi pendahulu Afghani dan Abduh. Tahtawi pernah tinggal di Paris selama lima tahun dan menyaksikan dari dekat sistem politik, tata budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Perancis yang sedang bergairah mengamalkan Pencerahan. Seperti terekam dalam bukunya *Takhlis al-Ibriz ila talkhis al-Bariz* (baru-baru ini diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi *al-Imam in Paris*), Tahtawi tertarik dengan konsep kebebasan di Eropa yang memberi tempat pada hak-hak individu

dan sangat antipati dengan absolutisme kekuasaan yang menurut sangkaan awal Tahtawi tidak dikenal dalam tradisi politik Islam.⁷⁴

Tapi semakin lama ia mendalami kebebasan Eropa, Tahtawi akhirnya berkesimpulan bahwa apa yang disebut oleh manusia Eropa sebagai kebebasan sesungguhnya sedikit banyak paralel dengan konsep keadilan dalam Islam. Bukankah Islam menyerukan agar penguasa bersikap adil? Bukankah keadilan dalam Islam adalah pernyataan antipati terhadap kekuasaan yang zalim? Demikian Tahtawi.

Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh yang paling berjasa menyebarkan gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Selesai berguru kepada Abduh, ia meninggalkan Mesir. Karena situasi politik tak menguntungkan, ia tak kembali ke Indonesia, transit di Singapura mulai menyebarkan gagasannya. Di Singapura (1906) ia mendirikan majalah *Islam al-Imam*. Nama ini terinspirasi dari panggilan akrab Syekh Muhammad Abduh. Lewat Djalaluddin, gagasan pembaruan dan liberalisme Islam Timur Tengah disebarkan di Indonesia dan Malaysia.

Majalah al-Imam menjadi media Islam pertama yang menyebarkan gagasan liberalisme Islam di Indonesia. Pada tahun 1911 majalah Islam lainnya *al-Munir* terbit di Sumatera. Pendirinya Abdullah Ahmad adalah murid Shekh Ahmad Khatib (reformis Melayu yang bermuqim di Makkah). Majalah ini

⁷⁴Mohammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islami al-Hadith Wa Siratuhu Bi al-Isti'mari al-Ghabiyyi*, alib bahasa, Su'adi Saat, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986), 107-116.

bersama al-Imam menjadi corong kaum muda menyebarkan gagasan Islam Liberal.

Zuly Qodir mencermati munculnya komunitas Islam Liberal sekitar awal tahun 2001, dengan menggunakan *mailing-list Islamlib*, dan berkantor di Utan Kayu 58 H, Jakarta, adalah bagian dari perjalanan panjang warna pemikiran dan gerakan Islam Indonesia. Islam Liberal dengan komunitasnya melakukan kampanye besar-besaran di harian umum Jawa Pos minggu, dan Radio 68 H dengan cabangnya hampir di seluruh provinsi. Islam Liberal diandalkan untuk mengemas corak Islam yang lebih relevan dengan pluralisme dan demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bahwa kemunculan Islam Liberal telah menyita banyak perhatian umat Islam, yakni Islam shri'ah atau Islam fundamentalis. Akan tetapi selama ini Islam Liberal lebih banyak mengusung tema-tema yang elitis, maka keberadaannya terkesan elitis. Bahkan Zuly Qodir menengarai Islam liberal ini terkesan propasar/kapitalis dan neo-liberalisme. Dengan adanya kesan negatif ini, maka khalayak pun pada akhirnya harus rela menyatakan bahwa Islam Liberal memang gerakan Islam yang kurang membumi, tetapi elitis dalam arti gagasan.

Di kalangan Muhammadiyah, muncul istilah baru, yakni Islam Transformatif, yang diusung oleh Muslim Abdurrahman, generasi Muhammadiyah yang tampak lebih dekat dengan kaum Nahdhiyyin, sekalipun belakangan tercatat sebagai pengurus PP Muhammadiyah⁷⁵ sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan, (lembaga yang menurutnya paling tidak ilmiah) di lingkungan Muhammadiyah.

⁷⁵Hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005, mencantumkan Muslim Abdurrahman sebagai salah satu pengurus PP Muhammadiyah.

Nilai-nilai Liberalisme dalam Muhammadiyah jika diukur menggunakan teori Kurzman⁷⁶ yang mendasarkan pada 6 (enam) state of mind yakni 1) Sikap terhadap Teokrasi, 2) Sikap terhadap Demokrasi, 3) Penghargaan terhadap hak-hak Perempuan, 4) Penghargaan terhadap hak-hak Non Muslim, 5) Kebebasan berfikir, dan 6) Progresifitas atau Kemajuan⁷⁷, maka sebagian besar point-point tersebut berlaku di Muhammadiyah. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan materi yang ada dalam rumusan MKCH (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup) Muhammadiyah, dan dalam dokumen ideologis *al-Mar'ah Fi al-Islam*, serta dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah.⁷⁸

H. Muhammadiyah dan Pluralisme

Anthony Giddens memaknai Pluralisme sebagai perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme (asal usul kelahiran, agama, dan hal-hal bawaan) dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan. Secara sederhana pluralisme dikatakan sebagai paham tentang kemajemukan masyarakat. Masyarakat majemuk (*plural society*) ialah suatu masyarakat di mana sejumlah etnik dan golongan hidup secara berdampingan yang sebagian besar berbeda satu sama lain.⁷⁹ Dalam perkembangan umat manusia di tengah globalisasi dan kesadaran akan pentingnya harmoni, pluralisme telah tumbuh menjadi semacam ideologi baru yang digandrungi oleh generasi

⁷⁶Charles Kurzman, "Introduction: Liberal Islam and its Islamic Context". dalam *Liberal Islam: A Source Book*, Charles Kurzman, ed. New York: Oxford University Press.

⁷⁷Luthfi Assyuani, *Mencerahkan dan Membebaskan*, dalam: Marjohan, www.islamlib.com/wawancara/marjohan.html, tertanggal 28-2-2008, diakses 12 Desember 2009.

⁷⁸PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*.

⁷⁹Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1993), 45.

baru. Dalam dunia politik kini lahir partai-partai politik dengan ideologi inklusif (terbuka) sebagai antitesis dari partai politik dengan ideologi eksklusif di mana dalam kalangan umat Islam masih mengalami perdebatan yang kontroversial baik di level strategi maupun teologi.

Kompleksitas kehidupan dan interaksi masyarakat dengan dunia luar telah pula ikut menciptakan kompleksitas budaya. Kalau sekarang muncul eksklusivisme kelompok yang kian menonjol, dimana rasa persaudaraan dan semangat kebersamaan semakin hilang, dan konflik-konflik sosial yang menafikan kemajemukan muncul di berbagai tempat, semua itu terjadi karena sebagai bangsa kita kurang memahami fondasi keindonesiaan. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula:

- a. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar.
- b. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sah. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama.
- c. Kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerja sama, dan

pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama.

- d. Dan sebagai sinonim untuk toleransi agama, yang merupakan prasyarat untuk ko-eksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda.

Dalam pandangan Islam (mainstream), sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan (*pluralitas*). Namun bukan berarti beranggapan bahwa semua agama adalah sama (*pluralisme*), artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang paham pluralisme dalam agama Islam. Namun demikian, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebar oleh kalangan Muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum diinukum wa liya diin*). Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada.

Muhammadiyah, dalam perjalanan panjangnya sebagai gerakan keagamaan, telah tercatat sebagai gerakan Islam modernis *par excellence* di Indonesia. Tentu saja, modernitas yang hendak dikembangkan dan diemban oleh Muhammadiyah adalah modernitas yang tidak semata-mata mengakomodasi nilai-nilai Barat *ansich*, tetapi lebih dari itu justru ingin melakukan modernisasi Islam lewat gerakan purifikasi ajaran-ajaran Islam yang dianggap telah menyimpang.

Realitas tersebut banyak memberi kontribusi dalam perkembangan gerakan Muhammadiyah baik yang ada di daerah maupun pusat. Hal tersebut wajar karena memang pada dasarnya Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan yang berbasis pada massa, sehingga lembaga-lembaga itu secara tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat riil.

Dalam hal ini seringkali Muhammadiyah menemui jalan buntu, terutama ketika dihadapkan dengan persoalan antaragama. Karena disadari atau tidak Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang teguh dalam menjalankan ajarannya, seringkali masih ragu untuk melakukan lompatan-lompatan kultural apalagi kultur yang dimotori oleh perbedaan agama.

Nilai-nilai pluralisme dalam Muhammadiyah, jika menggunakan ukuran Abd. A'la ketika menganalisis pemikiran keagamaan dalam Nahdhatul Ulama, yakni dengan mengedepankan 5 (lima) indikator yaitu 1) *tawasut* (moderat), 2) *i'tidal* (proporsional), 3) *uhwah* (persaudaraan), 4) *tasamuh* (toleran), dan 5) *tawazun* (keseimbangan)⁸⁰ maka secara analogis (meskipun tidak sama dan sebangun) di dalam perkembangan pemikiran Muhammadiyah juga terjadi hal yang sama. Hal ini dapat dirujuk ke berbagai dokumen rumusan ideologis Muhammadiyah seperti MKCH, Kepribadian Muhammadiyah, pernyataan

⁸⁰Abd. A'la. *Pluralisme dan Islam Indonesia Ke Depan: Ketakberdayaan Umat dan Politisasi Agama Sebagai Tantangan*. Dalam, Sururin (ed). *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak*. Bandung: Nuansa, 2005, hal. 137. Lebih lanjut Abd. A'la menegaskan bahwa melalui pola keberagaman yang disebut Ahli sunnah wal jamaah (aswaja) ini, NU menyatakan bahwa Indonesia dalam bentuk negara yang berdaarkan UUD 1945 merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia. Sikap ini merupakan bentuk kongkret dari sikap moderasi keberagaman NU yang menggambarkan secara jelas tentang pluralisme ang dianutnya.

Pemikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad (hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang).⁸¹

Secara umum, dapat ditemukan adanya polarisasi sikap dalam kalangan Muhammadiyah berkaitan dengan wacana pluralisme agama. Secara kategoris, penulis bisa menyebut ada tiga kelompok dalam Muhammadiyah yang merespon wacana ini. Ada generasi tua konservatif, generasi tua yang progresif dan kelompok muda yang cenderung liberal. Kelompok pertama, oleh Zuly Qodir sering disebut sebagai kelompok konservatif, yang menurutnya, adalah sekelompok orang Muhammadiyah yang menjadikan sebagai organisasi yang kegemukan, namun tidak lagi progresif menangkap tanda-tanda zaman. Muhammadiyah konservatif telah terjebak pada aktivitas amal usaha praktis yang menjadi semacam ritual dalam Muhammadiyah. Akibatnya respon mereka terhadap isu-isu baru yang dicurigai merupakan produk Barat sangatlah negatif.

Kelompok kedua adalah sejumlah pemikir generasi tua Muhammadiyah yang justru berpandangan berbeda dengan kelompok pertama. Meskipun dari kategori usia, mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok pertama, tetapi kelompok kedua lebih progresif dalam merespon isu-isu baru, termasuk di dalamnya pluralisme agama. Sekadar contoh, kelompok ini diwakili oleh Amin Abdullah, Munir Mul Khan dan Moeslim Abdurrahman.

Sementara kelompok ketiga didominasi anak-anak muda Muhammadiyah yang belakangan juga mulai tergugah untuk merespon stagnasi pemikiran dalam Muhammadiyah. Kelompok ini menamakan diri Jaringan Intelektual Muda

⁸¹Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang, tahun 2005.

Muhammadiyah (JIMM) yang meskipun masih seumur jagung, tetapi garis dan *mainstream* pemikirannya mulai bisa dilihat. Sebagian orang memang masih memandang kelahiran kelompok ini sebagai pemberontakan, yang bisa saja menimbulkan ekses negatif. Sebab, kata Kuntowijoyo, setiap ada pemberontakan mestilah timbul gejala *sawan kekanak-kanakan* (meminjam istilah Lenin) yang berupa cara berpikir *kekanan-kananan* (sok liberal) atau “*kekiri-kirian*” (sok radikal).⁸²

⁸²Pradana Boy ZTF, *Rekonstruksi Pemikiran Muhammadiyah*, 8. diakses dari : <http://publikasi.umm.ac.id/files/disk1/1/jiptummdppm-gdl-pradanaboy-6-1-rekonstr-b.rtf>. 20 Nopember 2009.